BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

AGUSTUS
2022

LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI PAPUA BARAT

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Periode Agustus 2022 dapat dipublikasikan. Publikasi rutin triwulanan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengulas perkembangan terakhir berbagai variabel ekonomi di tingkat provinsi, meliputi perkembangan makroekonomi, keuangan pemerintah, inflasi, pembiayaan daerah, sistem pembayaran dan peredaran uang rupiah, indikator kesejahteraan, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun berjalan. Kami mengharapkan publikasi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, perbankan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang memerlukan dan menaruh perhatian terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Papua Barat.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan dalam penyediaan data dan informasi kepada berbagai pihak terkait guna penyusunan buku Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat terutama kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat berserta dinas-dinas terkait, BPS Provinsi Papua Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, berbagai perusahaan, serta asosiasi dan akademisi. Semoga hubungan baik ini dapat terus terbina di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Kami menyadari masih banyak langkah-langkah penyempurnaan yang perlu kami lakukan. Saran dan kritik kami nantikan untuk penyempurnaan publikasi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam mengupayakan hasil kinerja dan karya yang terbaik.

Manokwari, Agustus 2022

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT

ttd

Rut W. Eka Trisilowati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR GAMBAR vi
KETERANGAN DAN SUMBER DATA vii
TABEL INDIKATOR TERPILIH ix
RINGKASAN EKSEKUTIF xi

BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL 1
1.1. Sisi Pengeluaran 2
1.1. Sisi Lapangan Usaha 8

BAB 2. KEUANGAN PEMERINTAH 12
2.1. APBN Provinsi Papua Barat 13
2.2. APBD Di Provinsi Papua Barat 2022 15

BAB 3. INFLASI 19
3.1. Perkembangan Inflasi 20
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok 21
3.3. Inflasi Menurut Kota IHK 22
3.4. Perkembangan Inflasi Triwulan II 2022 23
3.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah 24

BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN UMKM 27
4.1. Stabilitas Keuangan Korporasi 28
4.2. Stabilitas Keuangan Rumah Tangga 30
4.3. Perkembangan Institusi Perbankan 31

BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 38
5.1. Peredaran Uang Rupiah 39
5.2. Sistem Pembayaran 40

BAB 6. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 45
6.1. Ketenagakerjaan 46
6.2. Nilai Tukar Petani 48
6.3. Kemiskinan 49

BAB 7. PROSPEK EKONOMI 52
7.1. Prospek Perekonomian Indonesia 53
7.2. Prospek Perekonomian Papua Barat 55
7.3. Prospek Inflasi Papua Barat 56

TIM PENYUSUN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulampua (%, yoy) 2
Tabel 2.1. APBN Provinsi Papua Barat 2022 13
Tabel 2.2. APBD Seluruh Pemerintah Daerah Papua Barat 2022 15
Tabel 6.1. IT, IB, NTP, dan Pertumbuhan NTP (qtq) Sektoral 48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat 2
Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat menurut Pengeluaran (%,yoy) 3
Grafik 1.3. Survei Konsumen 3
Grafik 1.4. *Google Mobility Index* 3
Grafik 1.5. Kredit Konsumsi 4
Grafik 1.6. Pagu Belanja Total 4
Grafik 1.7. Realisasi Belanja Total 5
Grafik 1.8. Ekspor Luar Negeri 5
Grafik 1.9. Impor Luar Negeri 6
Grafik 1.10. Pagu Belanja Modal 6
Grafik 1.11. Realisasi Belanja Modal 7
Grafik 1.12. Belanja Modal Konsolidasi APBN APBD 7
Grafik 1.13. Kredit Investasi 7
Grafik 1.14. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha 8
Grafik 1.15. Kredit Pertambangan 8
Grafik 1.16. Kredit Industri Pengolahan 9
Grafik 1.17. Realisasi Pengadaan Semen 9
Grafik 1.18. Kredit Konstruksi 9
Grafik 1.19. Kredit Pemilikan Rumah 10
Grafik 1.20. Kredit Pertanian dan Perikanan 10
Grafik 2.1. Proporsi Pagu Belanja APBN Papua Barat 14
Grafik 2.2. Realisasi APBN Papua Barat Triwulan II 2022 (%) 14
Grafik 2.3. Realisasi TKDD Papua Barat Triwulan II 2022 14
Grafik 2.4. Derajat Desentralisasi 16
Grafik 2.5. Ketahanan Fiskal 16
Grafik 2.6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 16
Grafik 2.7. Efektivitas Pendapatan Daerah 17
Grafik 2.8. Rasio Realisasi Belanja Daerah 17
Grafik 3.1. Inflasi Tahunan Papua Barat dan Nasional 20
Grafik 3.2. Inflasi Tahun Kalender Papua Barat dan Nasional 20
Grafik 3.3. Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran 21
Grafik 3.4. Inflasi Angkutan Udara 22
Grafik 3.5. Inflasi Kota Sorong 23
Grafik 3.6. Inflasi Kota Manokwari 23
Grafik 4.1. Pertumbuhan Kredit Korporasi 28
Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektoral 28
Grafik 4.3. Perkembangan NPL Kredit Korporasi 28
Grafik 4.4. NPL Per Sektor Lapangan Usaha 29
Grafik 4.5. NPL Per Sektor Pengeluaran 29
Grafik 4.6. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga 30
Grafik 4.7. Pertumbuhan NPL Kredit Rumah Tangga 30
Grafik 4.8. Pangsa DPK 31
Grafik 4.9. Perkembangan Aset Perbankan 31
Grafik 4.10. Pangsa Aset Perbankan 32
Grafik 4.11. DPK menurut Kelompok Bank 32
Grafik 4.12. Klasifikasi DPK 33
Grafik 4.13. Kredit Perbankan 33
Grafik 4.14. Komposisi Kredit Perbankan 34
Grafik 4.15. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum 35
Grafik 4.16. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum 35

Grafik 4.17. Perkembangan Kredit MKM 35
Grafik 4.18. Komposisi Kredit Berdasarkan Skala UMKM 36
Grafik 4.19. Komposisi Kredit UMKM 36
Grafik 4.20. Pangsa Sektor Kredit MKM 36
Grafik 4.21. Komponen DPK Perseorangan 36
Grafik 5.1. *Inflow Outflow* Uang di Provinsi Papua Barat 39
Grafik 5.2. RTGS Papua Barat 39
Grafik 5.3. Penggunaan APMK 40
Grafik 5.4. Penggunaan Kartu ATM dan Debit 40
Grafik 5.5. Penggunaan kartu Kredit 41
Grafik 5.6. Transaksi SKNBI Papua Barat 41
Grafik 5.7. Jumlah Mesin ATM dan Rasio per 1000 km^2 42
Grafik 5.8. Jumlah Agen LKD dan Rasio per 1000 km^2 42
Grafik 5.9. Perkembangan BSNT PKH 2020-2022 42
Grafik 5.10. Program Sembako 2020-2022 43
Grafik 5.11. Transaksi Jual Beli KUPVA BB 43
Grafik 5.12. Perkembangan Merchant QRIS 43
Grafik 5.13. Transaksi Jual Beli KUPVA BB berdasarkan Kurs 43
Grafik 6.1. Pangsa Penduduk Usia Kerja 46
Grafik 6.2. Pangsa Angkatan Kerja Per Sektor 46
Grafik 6.3. Pangsa Penduduk Bekerja 47
Grafik 6.4. Pendidikan Penduduk Bekerja 47
Grafik 6.5. Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran 47
Grafik 6.6. TPT berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 48
Grafik 6.7. Perkembangan NTP 48
Grafik 6.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 49
Grafik 6.9. Perkembangan Indeks Gini Ratio 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Negara Tujuan Ekspor Luar Negeri..... 6

KETERANGAN DAN SUMBER DATA

Buku Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat berisi kajian mengenai perkembangan ekonomi Papua Barat pada triwulan berjalan, yang diterbitkan secara berkala setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.

Bab I Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan angka perkiraan atas dasar tahun 2010 bersumber dari BPS Provinsi Papua Barat.
Untuk kepraktisan, beberapa nama sektor dan subsektor disingkat sesuai kelaziman.
Data ekspor dan impor nonmigas Papua Barat bersumber dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang yang diolah Bank Indonesia, yang tercantum pula pada buku Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Papua Barat.

Bab II Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Bab III Data IHK dan inflasi bersumber dari BPS Provinsi Papua Barat, diolah lebih lanjut dan disandingkan dengan berbagai hasil survei KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Barat khususnya Survei Konsumen (SK) dan Survei Pemantauan Harga (SPH) untuk keperluan analisis. Data curah hujan bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG).

Bab IV Data perbankan berupa data kredit korporasi, rumah tangga, UMKM bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) bank-bank yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, khusus untuk data penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari *Datawarehouse* Bank Indonesia.

Bab V Data sistem pembayaran merupakan data di wilayah kerja KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Data transaksi tunai bersumber dari Departemen Pengedaran Uang, Bank Indonesia. Data transaksi non-tunai melalui BI-RTGS bersumber dari Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, sedangkan data transaksi non tunai melalui kliring bersumber dari data kliring KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.

Bab VI Data ketenagakerjaan daerah bersumber dari Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Sedangkan angka kesejahteraan menggunakan indikator Nilai Tambah Petani (NTP) yang juga bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.

Bab VII Prospek perekonomian regional dibuat atas dasar perkembangan indikator ekonomi dan moneter dengan didukung oleh hasil survei yang dilakukan KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Barat seperti SK dan SPH.

Buku ini diterbitkan pada akhir periode triwulan laporan sehingga angka yang disajikan dalam triwulan dimaksud sebagian di antaranya merupakan angka sementara hasil estimasi. Selanjutnya, adakalanya angka yang menunjukkan penjumlahan tidak selalu sama besarnya dengan penjumlahan angka-angka yang bersangkutan karena pembulatan.

Visi Bank Indonesia

Menjadi Bank Sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Nilai-nilai Strategi Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu: *Trust and Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest,* dan *Coordination and Teamwork* dengan berpegang pada prinsip spirit keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

a. PDRB

	2021				2022	
	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-8,03	1,59	6,99	4,04	5,90	2,75
Pertambangan dan Penggalian	4,59	-4,95	-2,62	4,96	-4,31	9,70
Industri Pengolahan	10,12	-9,79	-8,83	0,03	-2,32	8,45
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	14,22	12,08	6,40	9,71	2,08	10,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,15	3,54	7,13	7,30	6,91	2,38
Konstruksi	-8,11	-2,71	-0,36	-0,11	-2,03	3,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,56	5,96	-0,36	0,40	2,53	4,87
Transportasi dan Pergudangan	-12,39	13,18	3,91	-9,91	-1,63	13,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,21	4,30	7,18	6,84	7,94	14,17
Informasi dan Komunikasi	5,77	-0,29	-0,38	-3,74	-3,36	3,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	6,11	8,70	-7,88	0,10	0,18
Real Estate	-4,48	5,09	6,57	3,53	4,58	4,24
Jasa Perusahaan	-6,44	0,37	-2,01	-0,38	5,95	6,53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,08	5,76	2,50	-0,17	-0,12	-0,09
Jasa Pendidikan	-6,24	0,88	5,04	2,76	3,81	5,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,54	9,47	9,28	1,38	0,85	-0,18
Jasa lainnya	7,07	6,89	2,60	0,68	-4,31	4,63
Konsumsi Rumah Tangga	-4,63	6,04	1,82	8,51	5,92	4,22
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	-1,98	1,43	-6,85	-4,11	4,63	6,34
Konsumsi Pemerintah	3,27	1,55	-7,75	-8,20	1,87	3,09
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-2,14	-10,74	-12,24	18,28	-13,40	-3,54
Perubahan Inventori	-256,45	-302,04	-25,32	13,40	46,41	-91,03
Ekspor Luar Negeri	2,10	-12,90	-9,33	-3,08	-33,14	-9,43
Impor Luar Negeri	-76,82	0,27	-70,83	920,37	-43,32	-63,17
Net Ekspor Antarprovinsi	-721,45	-103,80	-27,20	-20,52	-86,63	-358,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

b. Inflasi

Inflasi Tahunan (%, YOY)	2020				2021				2022	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Papua Barat	2,37	1,52	0,33	0,71	1,73	3,28	2,99	3,47	2,83	2,91
Manokwari	2,15	1,4	0,75	-0,89	0,25	1,99	1,27	3,39	3,17	3,98
Sorong	2,43	1,56	0,22	1,16	2,15	3,65	3,48	3,49	2,73	2,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

c. Stabilitas Sistem Keuangan

Indikator		2020				2021				2022	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Perbankan											
Aset	(Rp Miliar)	19.470	19.710	23.887	21.030	19.307	19.836	18.807	20.652	18.963	19.808
Pertumbuhan Aset	(YoY)	13,93%	5,82%	29,07%	-6,35%	-0,84%	0,64%	-21,27%	-1,80%	-1,78%	-0,14%
	(QtQ)	-13,30%	1,23%	21,20%	-11,96%	-8,19%	2,74%	-5,19%	9,81%	-8,18%	4,46%
DPK	(Rp Miliar)	16.931	17.555	21.494	18.068	16.047	16.219	14.578	17.034	15.006	15.825
Pertumbuhan DPK	(YoY)	14,99%	7,23%	40,39%	-7,03%	-5,22%	-7,62%	-32,18%	-5,72%	-6,49%	-2,43%
	(QtQ)	-12,88%	3,69%	22,43%	-15,94%	-11,18%	1,07%	-10,11%	16,84%	-11,90%	5,45%
Kredit	(Rp Miliar)	13.338	13.297	13.678	13.994	13.990	14.247	14.434	15.069	14.944	15.068
Pertumbuhan Kredit	(YoY)	6,26%	2,59%	4,02%	0,48%	4,89%	7,15%	5,53%	7,69%	6,82%	5,76%
	(QtQ)	-4,23%	-0,31%	2,86%	2,31%	-0,03%	1,84%	1,31%	4,40%	-0,83%	0,83%
LDR (Lokasi Bank)		78,78%	75,74%	63,64%	77,45%	87,18%	87,85%	99,01%	88,47%	99,59%	95,22%
NPL (Lokasi Bank)	(Rp Miliar)	336	405	339	351	364	389	398	391	541	589
NPL Ratio (Lokasi Bank)		2,52%	3,04%	2,48%	2,51%	2,60%	2,73%	2,76%	2,59%	3,62%	3,91%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 6,07% (yoy), meningkat setelah mengalami penurunan sebesar -1,01% (yoy) pada triwulan I 2022. Pertumbuhan tersebut didorong oleh relaksasi restriksi mobilitas masyarakat sejalan dengan pemulihan perekonomian nasional dan global. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan yang positif pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terbesar disumbang oleh pertambangan dan penggalian serta diikuti industri pengolahan. Adapun kontraksi pertumbuhan hanya disumbang oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan III 2022 diperkirakan melambat dibanding triwulan II 2022 seiring dengan normalisasi HBKN Idul Fitri serta Idul Adha 1443 H.

KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi pendapatan APBN triwulan II 2022 di Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 16,03% (yoy) dibanding triwulan II 2021. Dari sisi belanja, tingkat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat turut meningkat dari 36,17% pada triwulan II 2021 menjadi 38,46% pada triwulan II 2022.

Realisasi pendapatan APBD seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua Barat tahun 2022 meningkat sebesar 16,66% (yoy). Peningkatan pendapatan ini didorong oleh peningkatan realisasi TKDD dari sisi APBN. Namun realisasi belanja APBD mengalami penurunan sebesar -2,95% (yoy) seiring dengan penurunan pagu belanja APBD tahun 2022. Penurunan ini utamanya disumbangkan oleh Belanja Transfer ke Pemerintah Desa yang menurun dari 22,77% pada triwulan II 2021 menjadi 16,01% pada triwulan II 2022.

INFLASI

Pada triwulan II 2022, inflasi Papua Barat tercatat sebesar 2,91% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,83% (yoy) seiring dengan momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1443H serta pelonggaran restriksi mobilisasi masyarakat. Inflasi Papua Barat 2022 tetap terkendali dengan pencapaian sampai dengan triwulan II 2022 sebesar 2,21% (ytd) dan tetap berada dalam rentang sasaran 3±1%. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Papua Barat, laju inflasi di Kota Sorong tercatat sebesar 2,62% (yoy) atau 1,92% (ytd), sementara inflasi di Kabupaten Manokwari tercatat relatif lebih tinggi sebesar 3,98% (yoy) atau 3,26% (ytd). Inflasi Papua Barat pada triwulan III 2022 diprakirakan meningkat dibanding triwulan II 2022 seiring dengan peningkatan harga komoditas global seiring dengan geotensi politik. Adanya prakiraan peningkatan inflasi mendorong TPID Provinsi Papua Barat melakukan koordinasi dan sinergi secara lebih intensif dalam upaya mengarahkan inflasi berada pada sasaran inflasi 2022 sebesar 3%±1% (yoy) melalui strategi 4K pengendalian inflasi.

PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2022 masih terjaga. Kredit korporasi mengalami penurunan akibat masih berlangsungnya pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, nilai aset dan DPK mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, kinerja sektor UMKM

mengalami peningkatan yang mengindikasikan aktivitas perdagangan yang mulai tumbuh. Lebih lanjut, NPL masih terjaga pada level yang aman.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2022, terjadi *net outflow* uang kartal sebesar Rp307,03 miliar atau meningkat 52,74% (yoy), sejalan dengan ekspansi pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua barat yang tercatat sebesar 6,82% (yoy) serta normalisasi belanja masyarakat pasca Tahun Baru 2022 dan Lebaran Idul Fitri 2022, serta awal tahun anggaran yang masih dalam tahap perencanaan. Transaksi non tunai melalui BI-RTGS, SKNBI dan Kartu Kredit mengalami penurunan, sebaliknya transaksi menggunakan Kartu Debit mengalami peningkatan jumlah transaksi.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan masyarakat mulai membaik di masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dilihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Ketenagakerjaan di Papua Barat mengalami penurunan pada Februari 2022 seiring dengan pemulihan roda perekonomian nasional. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2021 serta indeks gini ratio Papua Barat turut mengalami penurunan. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan pada Februari 2022 dibandingkan posisi Agustus 2021.

PROSPEK EKONOMI

Perekonomian global pada tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang mampu menumbuhkan optimisme global dan memberikan dampak positif, baik pada perekonomian nasional maupun Papua Barat.

Perekonomian Papua Barat pada 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2021. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada triwulan I 2022 seiring dengan normalisasi pasca HBKN Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diperkirakan akan kembali membaik pada triwulan selanjutnya seiring dengan relaksasi restriksi mobilitas masyarakat, efektivitas program vaksinasi, dan berbagai kebijakan *counter cyclical* yang diambil oleh Pemerintah dan kebijakan moneter akomodatif diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi secara gradual selama tahun 2022.

PROSPEK INFLASI

Inflasi keseluruhan pada tahun 2022 diperkirakan akan berada pada rentang atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,0%±1% (yoy) seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan kenaikan harga komoditas global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Perekonomian yang meningkat diikuti oleh inflasi yang stabil dan dalam *range* yang ditentukan harus tetap diupayakan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB I: EKONOMI MAKRO REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 6,07% (yoy), meningkat setelah mengalami penurunan sebesar -1,01% (yoy) pada triwulan I 2022. Pertumbuhan tersebut didorong oleh relaksasi restriksi mobilitas masyarakat sejalan dengan pemulihan perekonomian nasional dan global. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan yang positif pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan terbesar disumbang oleh Pertambangan dan Penggalian serta diikuti Industri Pengolahan. Adapun kontraksi pertumbuhan hanya disumbang oleh LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan III 2022 diperkirakan melambat dibanding triwulan II 2022 seiring dengan normalisasi HBKN Idul Fitri serta Idul Adha 1443 H.

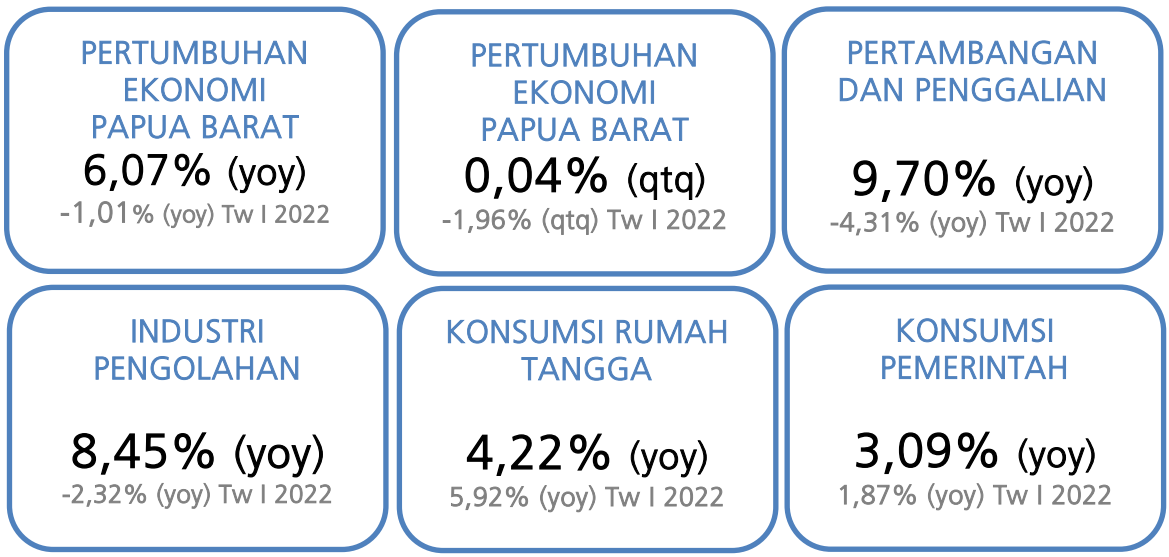

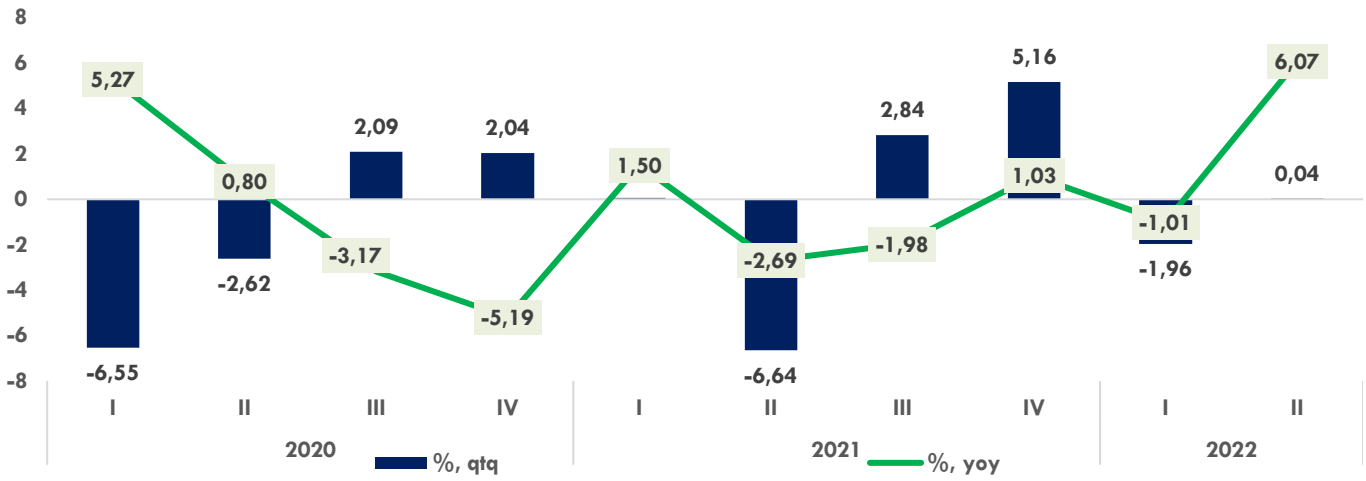

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat

PERTUMBUHAN EKONOMI MAKRO REGIONAL PAPUA BARAT TRIWULAN I 2022

Perekonomian Papua Barat pada triwulan II 2022 meningkat dibanding triwulan I 2022 maupun triwulan II 2021. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Papua Barat pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 6,07% (yoy), berbalik arah dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -1,01% (yoy) maupun triwulan II 2021 yang juga terkontraksi sebesar -2,69% (yoy). Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Provinsi Papua Barat berada pada urutan ke-4 (empat) tertinggi dari seluruh Provinsi di regional Sulampua pada triwulan II 2022 serta tumbuh lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan ekonomi nasional.

PROVINSI	TRIWULAN I 2022	TRIWULAN II 2022
MALUKU UTARA	29,63	27,74
PAPUA	13,33	14,38
SULAWESI TENGAH	10,49	11,17
SULAWESI TENGGARA	5,07	6,09
PAPUA BARAT	**-1,01**	**6,07**
SULAWESI UTARA	3,86	5,93
SULAWESI SELATAN	4,27	5,18
GORONTALO	3,17	4,91
MALUKU	3,69	4,81
SULAWESI BARAT	0,93	2,13
SULAMPUA	**9,05**	**8,22**
PDB NASIONAL	**5,02**	**5,44**

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulampua (%, yoy)

Dari sisi pengeluaran, sektor konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Di sisi lain, sektor investasi dan ekspor luar negeri masih terkontraksi meskipun keduanya menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan I 2022.

Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan tertinggi didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan. Semua lapangan usaha turut menunjukkan pertumbuhan positif kecuali pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

1.1. SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan II 2022 disumbang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,22% (yoy), dan konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 3,09% (yoy). Ekspor Luar Negeri menjadi sumber kontraksi terbesar pada triwulan II 2022 dengan tingkat penurunan sebesar -9,43% (yoy). Investasi menjadi sumber penurunan terbesar kedua sebesar -3,54% (yoy).

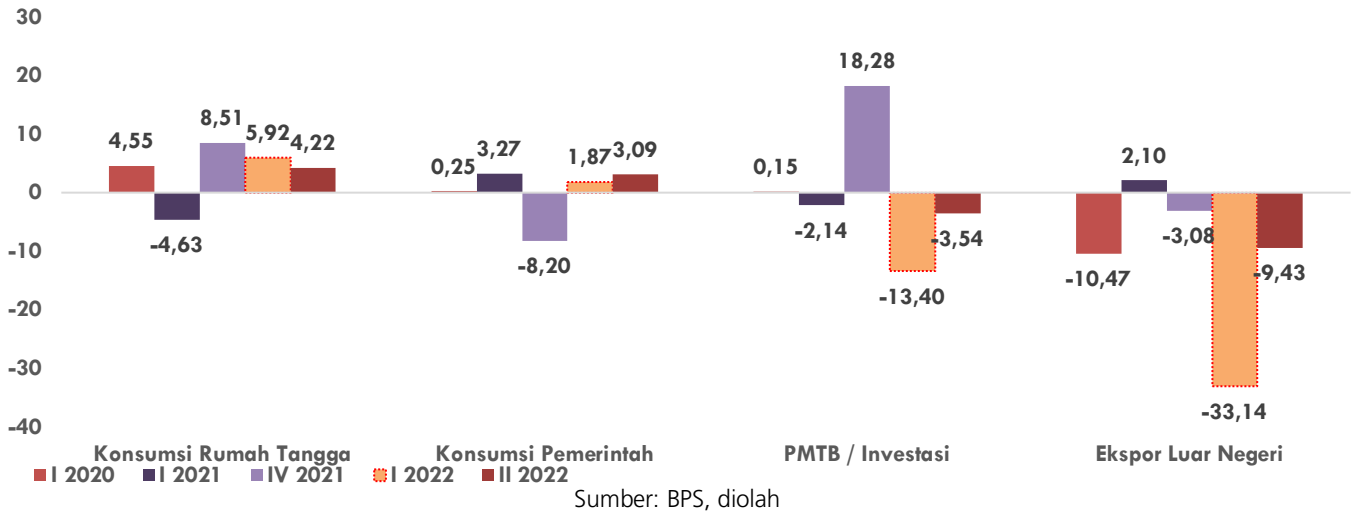

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran (%, yoy)

KONSUMSI RUMAH TANGGA (RT)

Konsumsi RT mengalami pertumbuhan sebesar 4,22% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat 5,92% (yoy), maupun triwulan II 2021 yang tercatat tumbuh sebesar 6,04% (yoy). Tingkat pertumbuhan yang melambat tersebut didorong oleh kebijakan Pemerintah yang memberikan relaksasi pada pengaturan restriksi mobilitas dimasa pandemi COVID-19, di mana masyarakat diperkenankan untuk merayakan HBKN Idul Fitri 1443H di luar domisili, sehingga sebagian Konsumsi RT masyarakat pendatang menurun sebagai subtitusi atas konsumsi mereka di luar Papua Barat.

Kinerja pertumbuhan konsumsi RT juga terindikasi oleh Survei Konsumen yang mencatat peningkatan rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 121,78 pada triwulan I 2022 menjadi 128,20 pada triwulan II 2022. Peningkatan IKK seiring dengan perayaan HBKN Idul Fitri 1443H dan Idul Adha 1443H, serta didorong oleh penurunan jumlah kasus COVID-19 yang signifikan di Papua Barat. Sejalan dengan peningkatan IKK, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) turut meningkat dari 104,56 pada triwulan I 2022 menjadi 114,86 pada triwulan II 2022. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga turut meningkat dari 139,00 pada triwulan I 2022 menjadi 141,70 pada triwulan II 2022.

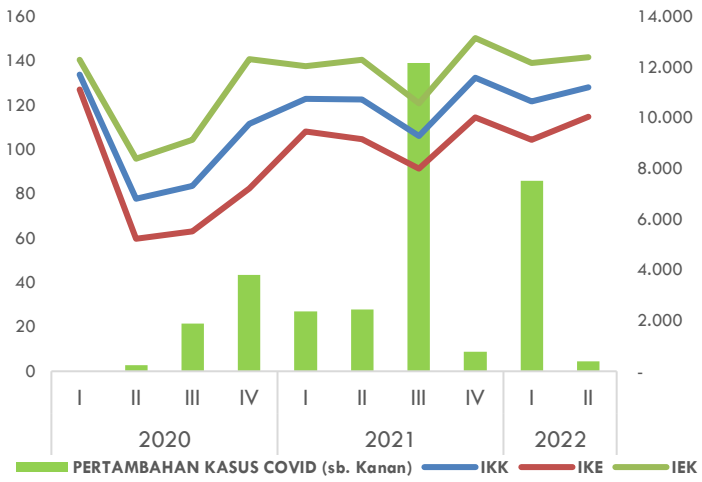

Sumber: Bank Indonesia dan Satgas COVID-19, diolah

Grafik 1.3. Survei Konsumen

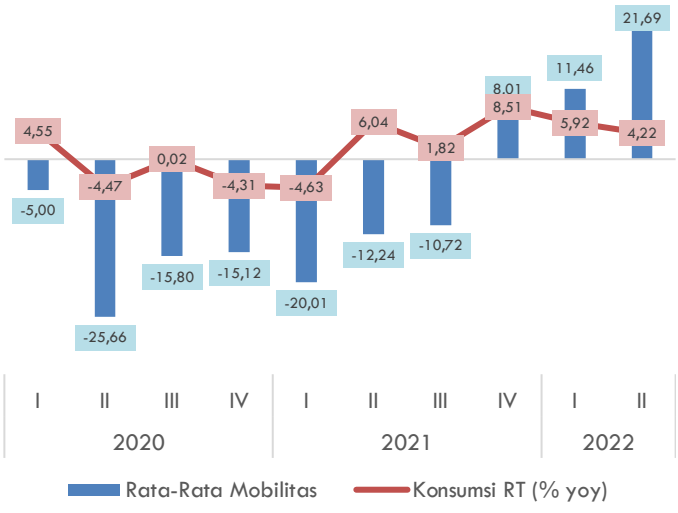

Sumber: Google dan BPS, diolah

Grafik 1.4. *Google Mobility Index*

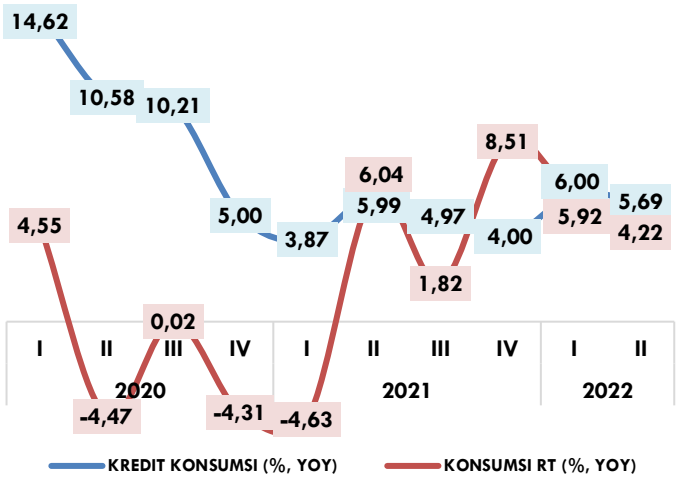

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah
Grafik 1.5. Kredit Konsumsi

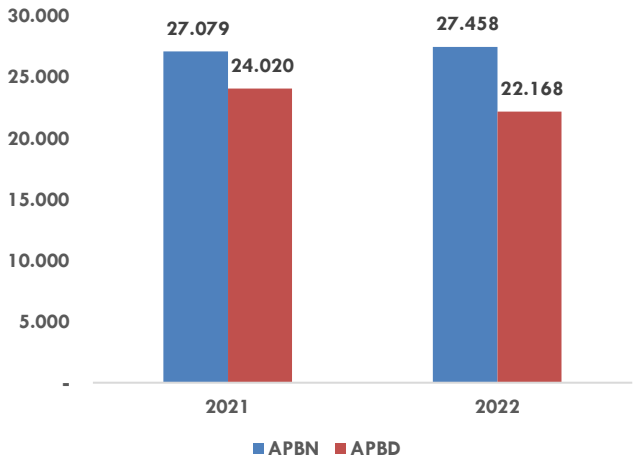

Sumber: DJPb
Grafik 1.6. Pagu Belanja Total (dalam Rp Miliar)

Dari sisi pembiayaan, kinerja kredit konsumsi tumbuh positif sebesar 5,69% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan I 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 6,00% (yoy). Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,99% (yoy), pertumbuhan kredit konsumsi tercatat lebih rendah namun masih mengindikasikan pemulihan perekonomian masyarakat di Papua Barat.

Mobilitas masyarakat di Papua Barat pada triwulan II 2022 turut menunjukkan pertumbuhan dengan mencatat nilai rata-rata *Google Mobility Index* sebesar 21,69. Tingkat mobilitas masyarakat di Papua Barat pada triwulan II 2022 lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2021 yang tercatat sebesar -12,24. Pada triwulan II 2022, tingkat mobilitas masyarakat tertinggi tercatat pada kategori penjualan bahan makanan dan farmasi. Hal tersebut menjadi indikasi positif akan pertumbuhan konsumsi masyarakat selama pandemi COVID-19 berlangsung.

KONSUMSI PEMERINTAH

Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 3,09% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 1,87% (yoy) serta mampu tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 1,55% (yoy). Secara konsolidasi APBN dan APBD, tingkat realisasi belanja hingga triwulan II 2022 tercatat sebesar 30,45%, lebih tinggi dibanding triwulan I 2021 yang terealisasi sebesar 28,34%. Secara nilai, belanja konsolidasi APBN dan APBD pada triwulan II 2022 tercatat lebih tinggi sebesar 4,32% (yoy).

Dari sisi APBN, tingkat realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 34,86%, lebih rendah dibanding triwulan II 2021 yang terealisasi sebesar 38,57%. Meskipun demikian, nilai realisasi belanja APBN pada triwulan II 2022 lebih tinggi sebesar 7,80% (yoy) dibanding triwulan II 2021. Dari sisi APBD, tingkat realisasi belanja pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 20,95%, lebih tinggi dibanding triwulan II 2021 yang terealisasi sebesar 19,52%. Secara nilai, realisasi belanja APBD pada triwulan II 2022 lebih rendah sebesar -2,95% (yoy) dibanding triwulan II 2021.

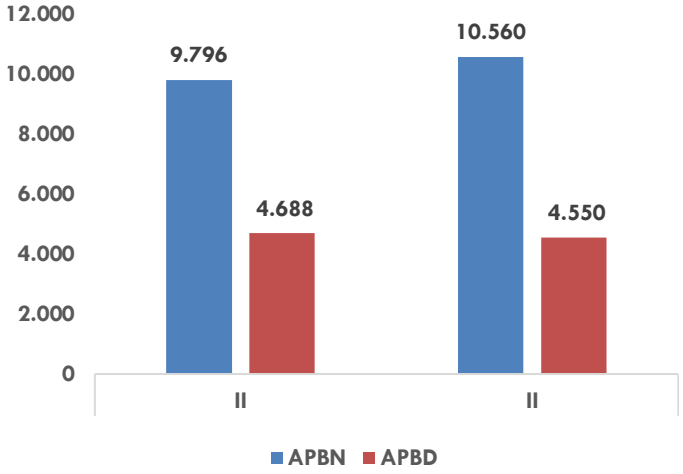

Sumber: DJPb
Grafik 1.7. Realisasi Belanja Total (Rp Miliar)

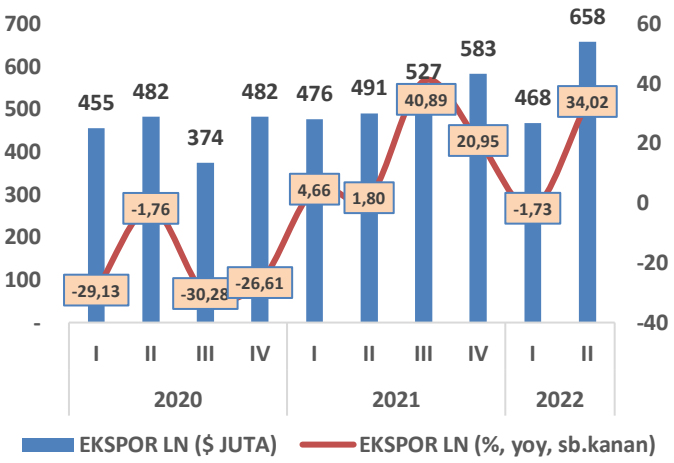

Sumber: DJBC, diolah
Grafik 1.8. Ekspor Luar Negeri

EKSPOR DAN IMPOR

Kinerja net ekspor (ADHK) di Papua Barat pada triwulan II 2022 mengalami kontraksi sebesar -14,00% (yoy). Penurunan tersebut disumbang oleh penurunan kinerja ekspor luar negeri (ADHK) sebesar -9,43% (yoy). Ekspor Luar Negeri Papua Barat pada triwulan II 2022 didominasi oleh *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari LNG Tangguh dengan pangsa ekspor sebesar 97,86%. Meskipun ekspor luar negeri (ADHK) mengalami kontraksi, total nilai *free on board* (FOB) ekspor luar negeri pada triwulan II 2022 tercatat mengalami peningkatan sebesar 34,02% (yoy) atau berbalik arah bila dibanding dengan pertumbuhan nilai FOB ekspor luar negeri pada triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar -1,73% (yoy).

Peningkatan nilai FOB tersebut disebabkan oleh naiknya harga LNG *Japan* sebesar 90,08% (yoy) sehingga penurunan jumlah kargo LNG ekspor tetap ditahan dengan peningkatan harga LNG *Japan*. Kuantitas ekspor kargo yang berkurang juga disebabkan oleh kebijakan DMO yang mewajibkan LNG Tangguh untuk memprioritaskan kebutuhan LNG dalam negeri. Menurut peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.02 Tahun 2006 pasal 1, DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan besaran yang sudah diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, ekspor luar negeri pada triwulan II 2022 bertujuan ke Tiongkok (69,33%), Jepang (26,29%), dan Korea Selatan (4,35%). Nilai ekspor barang FOB dari Papua Barat ke ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan masing-masing tercatat sebesar USD439,81 juta, USD166,78 juta, dan USD27,61 juta. Dari sisi pertumbuhan, ekspor Papua Barat ke Tiongkok mengalami peningkatan dari -15,44% (yoy) pada triwulan I 2022 menjadi 17,24% (yoy) pada triwulan II 2022. Ekspor Papua Barat ke Jepang turut mengalami pertumbuhan dari -10,84% (yoy) pada triwulan I 2022 menjadi 4347,47% (yoy) pada triwulan II 2022. Sebaliknya, ekspor Papua Barat ke Korea Selatan mengalami penurunan dari 143,07% (yoy) pada triwulan I 2022 menjadi -53,78% (yoy) pada triwulan II 2022. Dari sisi Impor luar negeri, Papua Barat terkontraksi -63,17% (yoy). Total nilai impor pada triwulan II 2022 menurun sebesar -54,31% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi sebesar 4,51% (yoy). Pertumbuhan impor yang negatif sejatinya bermakna positif terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat.

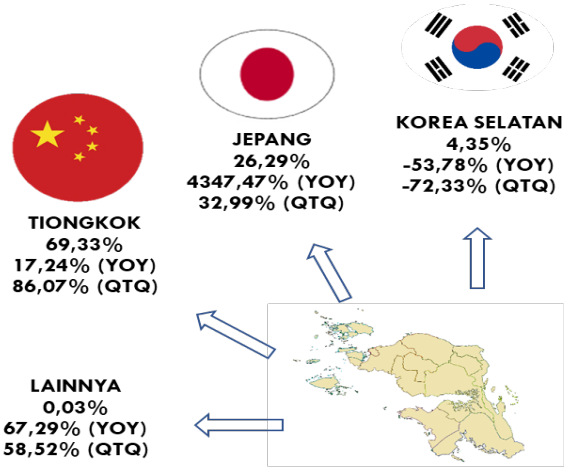

Sumber: DJBC, diolah
Gambar 1.1. Negara Tujuan Ekspor Luar Negeri

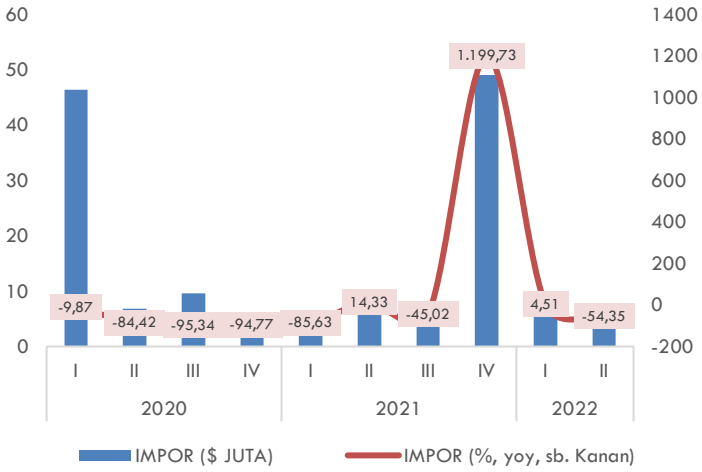

Sumber: DJBC, diolah
Grafik 1.9. Impor Luar Negeri

Pada triwulan II 2022, kegiatan impor luar negeri tercatat hanya terjadi di Bulan April 2022, sedangkan pada Bulan Mei dan Juni 2022 tidak ada kegiatan impor. Pada Bulan April 2022 tersebut, nilai impor luar negeri tercatat US$3,57 juta dengan komponen impor berasal dari golongan nonmigas. Komoditas penyumbang terbesar impor luar negeri Papua Barat pada triwulan II 2022 yaitu garam, belerang, dan kapur yang menyumbang 70,21% dari total impor Papua Barat atau senilai US$2,51 juta. Kegiatan impor luar negeri Papua Barat triwulan II 2022 hanya berasal dari dua negara, yaitu Oman dan Singapura.

PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTB) / INVESTASI

Kinerja investasi di Papua Barat pada triwulan II 2022 yang tercermin dari komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar -3,54% (yoy) atau membaik dibanding kontraksi pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar -13,40% (yoy). Kontraksi sektor investasi turut disebabkan oleh kontraksi realisasi belanja modal konsolidasi APBN dan APBD Papua Barat pada triwulan II 2022 seiring dengan penurunan pagu belanja modal akibat *refocusing* anggaran.

Dari sisi investasi pembangunan dari Pemerintah, pagu anggaran belanja modal APBN Papua Barat 2022 mengalami penurunan sebesar -28,51% (yoy) dan pagu anggaran belanja modal APBD Papua Barat 2022 juga mengalami penurunan sebesar -3,16% (yoy). Alokasi belanja modal infrastruktur digunakan agar tetap dapat menghasilkan *output* strategis infrastruktur Papua Barat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Pagu belanja modal yang menurun sebagai langkah efisiensi anggaran, tetapi tetap menjadi fungsi pokoknya sebagai roda penggerak ekonomi, menambah aset, dan mendorong investasi.

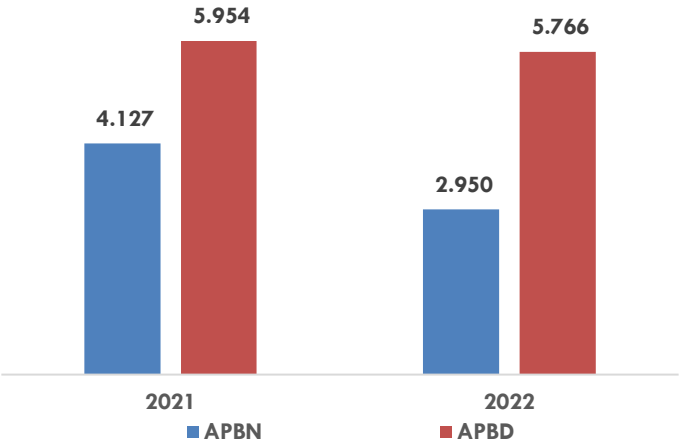

Sumber: DJBC, diolah
Grafik 1.10. Pagu Belanja Modal

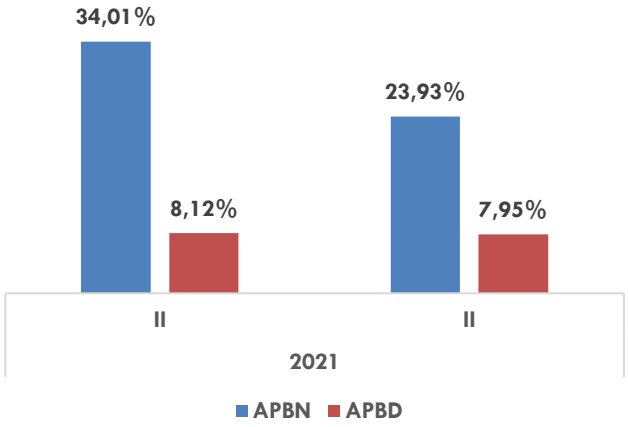

Sumber: DJBC, diolah
Grafik 1.11. Realisasi Belanja Modal

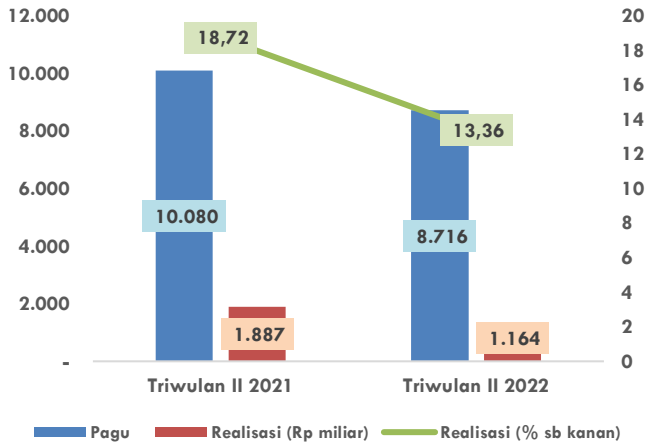

Sumber: DJBC, diolah
Grafik 1.12. Belanja Modal Konsolidasi APBN APBD

Dari sisi APBN Papua Barat, tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2022 tercatat sebesar 23,93%, atau lebih rendah dibanding tingkat realisasi tahun 2021 yang tercatat sebesar 34,01%. Nilai realisasi belanja modal turut mengalami penurunan sebesar -49,70% (yoy) seiring dengan penurunan besaran pagu belanja modal pada tahun 2022. Dari sisi APBD Papua Barat, tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2022 tercatat sebesar 7,95% dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar 8,12%. Nilai realisasi belanja modal APBD Papua Barat turut menunjukkan penurunan sebesar -5,16% (yoy).

Secara konsolidasi APBN dan APBD Papua Barat, pagu anggaran belanja modal tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -13,54% (yoy) dibanding tahun 2021. Tingkat realisasi belanja modal pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,36%, lebih rendah dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar 18,72%. Besaran realisasi belanja modal pada tahun 2022 tercatat menurun sebesar -38,29% (yoy).

Dari sisi pembiayaan, kinerja kredit investasi mengalami kontraksi sebesar -5,01% (yoy) atau membaik jika dibanding triwulan I 2022 yang tercatat kontraksi -5,79% (yoy). Penurunan kinerja kredit investasi sejalan dengan pertumbuhan investasi di Papua Barat yang masih terkontraksi.

Perbaikan tingkat pertumbuhan investasi di Papua Barat turut disebabkan oleh peningkatan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan II 2022. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PMA mengalami peningkatan sebesar 164,45% (yoy) dan diikuti oleh PMDN yang turut meningkat sebesar 289,00% (yoy). Meskipun konsolidasi belanja modal menunjukkan perlambatan, PMA dan PMDN Papua Barat pada triwulan II 2022 tumbuh. Adapun sektor Industri Kayu dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan menjadi *leading sector* PMA dan PMDN Papua Barat. Walaupun masih terkontraksi, investasi Papua Barat berada pada koridor pemulihan yang baik seiring dengan penanganan kasus COVID-19 dan mobilitas yang mulai membaik.

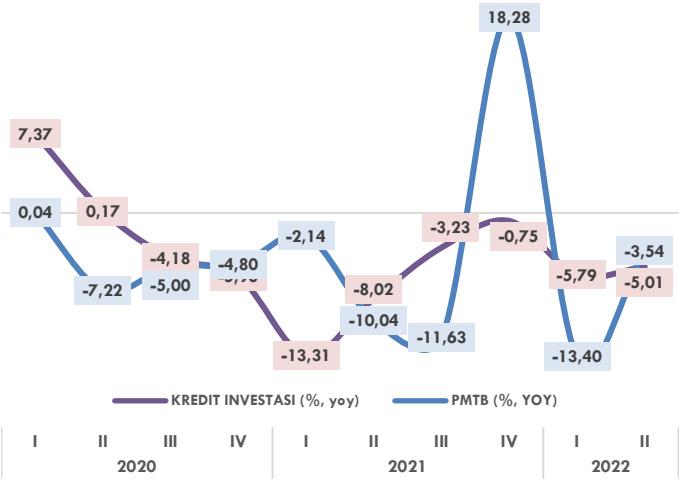

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah
Grafik 1.13. Kredit Investasi

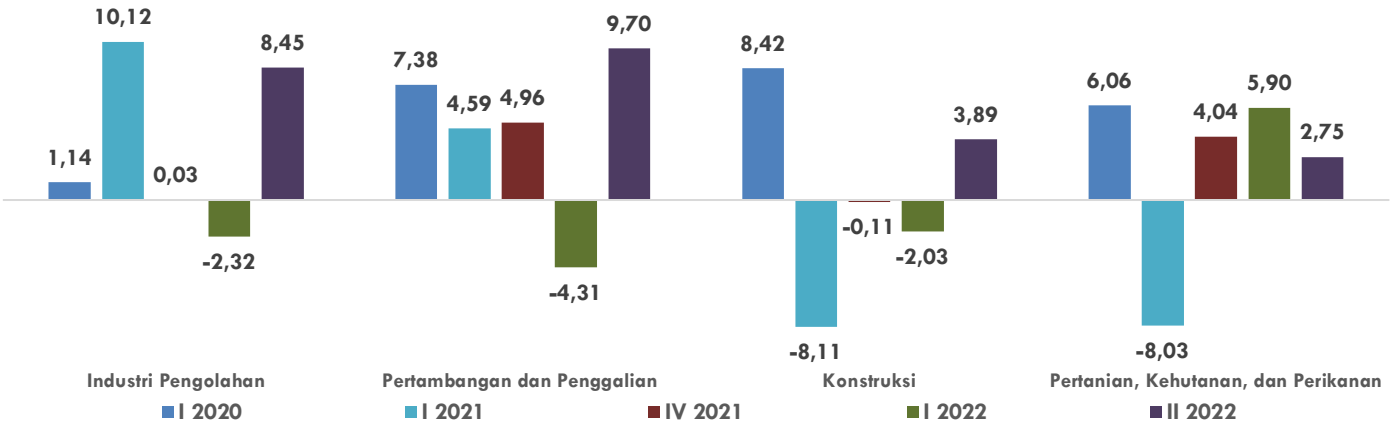

Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.14. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

1.2. SISI LAPANGAN USAHA

Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,07% (yoy) setelah terkontraksi sebesar -1,01% (yoy) pada triwulan I 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan II 2022 disumbang oleh peningkatan pada kinerja Pertambangan dan Penggalian serta Industri Pengolahan. Pertambangan dan Penggalian adalah sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan II 2022 sebesar 9,70% (yoy). Industri Pengolahan menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua yang tercatat sebesar 8,45% (yoy). Dari seluruh Lapangan Usaha, hanya LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencatatkan kontraksi sebesar -0,09% (yoy).

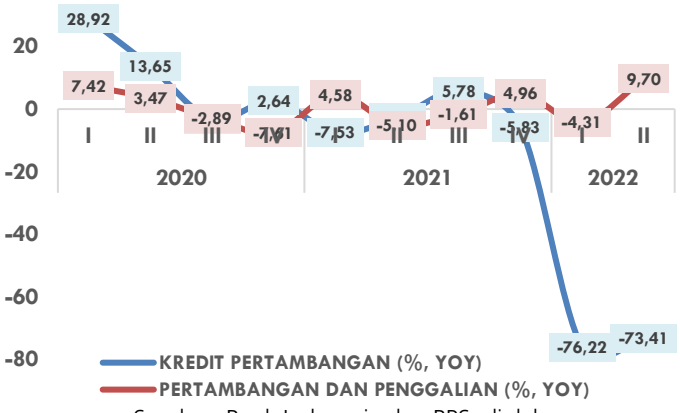

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah
Grafik 1.15. Kredit Pertambangan

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Pada triwulan II 2022, Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 9,70% (yoy), berbalik arah dibanding triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar -4,31% (yoy) maupun triwulan II 2021 yang tercatat sebesar -4,95% (yoy). Kinerja sektor pertambangan dan penggalian meningkat didorong oleh peningkatan produksi pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan data Kementerian ESDM Republik Indonesia, produksi pertambangan minyak bumi di Papua Barat tumbuh 8,60% (yoy).

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit pertambangan tercatat terkontraksi sebesar -73,41% (yoy) atau lebih baik dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang terkontraksi sebesar -76,22% (yoy). Perbaikan penyaluran kredit pertambangan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian.

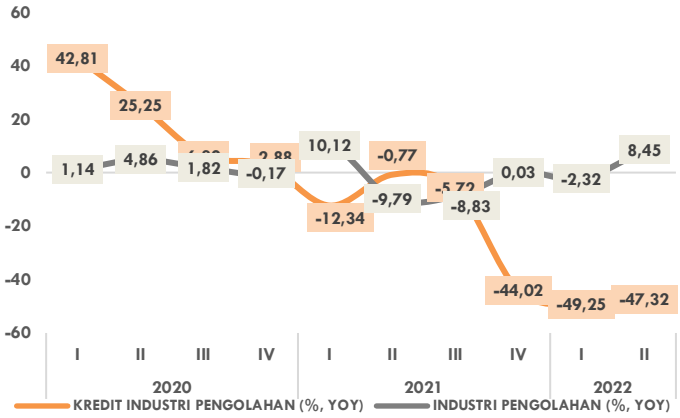

Sumber: Bank Indonesia dan BPS, diolah
Grafik 1.16. Kredit Industri Pengolahan

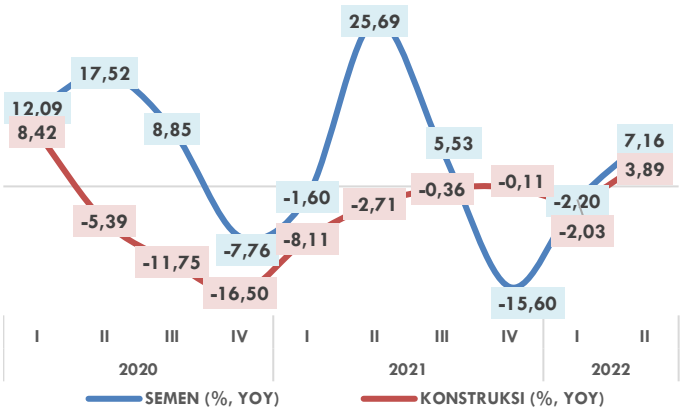

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia dan BPS, diolah
Grafik 1.17. Realisasi Pengadaan Semen

INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada triwulan II 2022, Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 8,45% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar -2,32% (yoy) serta lebih tinggi dibanding triwulan II 2021 yang terkontraksi -9,79 % (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja industri pengilangan minyak dan gas (migas) yang tumbuh sebesar 8,75% (yoy). Industri non-migas juga turut serta mengalami pertumbuhan seperti industri makanan dan minuman yang tumbuh 9,44% (yoy), industri kayu tumbuh 3,66% (yoy), serta industri barang galian bukan logam yang ikut tumbuh 8,99% (yoy).

Dari sisi perbankan, penyaluran kredit industri pengolahan menunjukkan perbaikan walaupun masih terkontraksi sebesar -47,32% (yoy) pada triwulan II 2022 dari triwulan I 2022 yang tercatat sebesar -49,25% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah produksi kargo LNG pada triwulan II 2022 yang tercatat sebanyak 28,6 kargo atau lebih banyak dibandingkan triwulan I 2022 yang tercatat 21,6 kargo dan lebih rendah dibanding triwulan II 2021 yang tercatat sebanyak 28,80 kargo. Peningkatan jumlah produksi kargo LNG disebabkan oleh dampak dari *planned maintenance* di *Train I* dan *Train II* LNG Tangguh yang terjadi pada triwulan I 2022 sehingga terjadi peningkatan kapasitas produksi LNG.

KONSTRUKSI

Pada triwulan II 2022, Konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 3,89% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar -2,03% (yoy), serta lebih baik dibanding triwulan II 2021 yang tercatat sebesar -2,71% (yoy). Akselerasi kinerja konstruksi dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah melalui beberapa proyek konstruksi seperti jalan,jembatan,drainase, dan bendungan. Selain itu, realisasi pengadaan semen di Papua Barat pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 7,16% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar -2,20% (yoy). Pertumbuhan realisasi pengadaan semen tersebut disebabkan oleh pembangunan yang mulai berlangsung setelah sempat terhenti selama pandemi COVID-19.

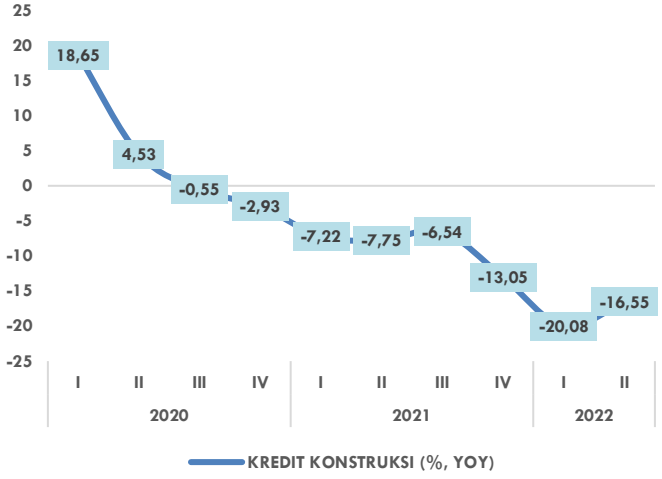

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1.18. Kredit Konstruksi

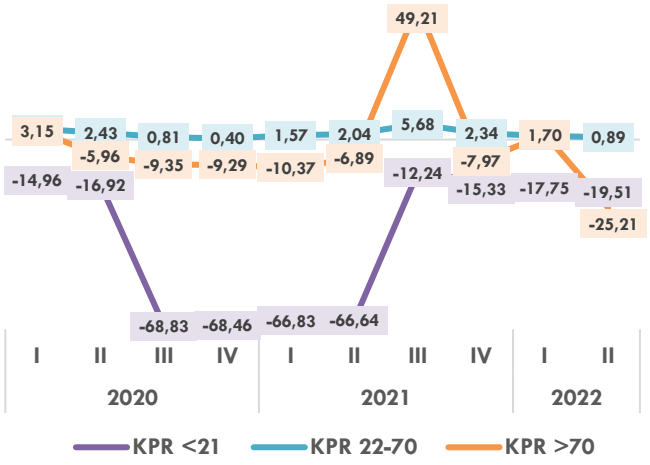

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1.19. Kredit Pemilikan Rumah

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1.20. Kredit Pertanian dan Perikanan

Dari sisi perbankan, pertumbuhan kredit konstruksi masih mengalami kontraksi sebesar -16,55% (yoy) pada triwulan II 2022, membaik dibanding triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar -20,08% (yoy), dan lebih dalam terkontraksi jika dibanding triwulan II 2021 yang terkontraksi -7,75% (yoy). Dari sisi kredit pemilikan rumah (KPR), pertumbuhan triwulan II 2022 untuk KPR untuk rumah dengan luas tanah di bawah 21m^2 tercatat kontraksi sebesar -19,51% (yoy). KPR untuk rumah dengan luas tanah sebesar 22 – 70 m^2 tercatat tumbuh positif sebesar 0,89% (yoy) dan KPR untuk rumah dengan luas tanah diatas 70m^2 tercatat terkontraksi sebesar -25,21% (yoy).

PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Pada triwulan II 2022, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,75% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 5,90% (yoy), dan lebih baik dibanding triwulan II 2022 yang tumbuh sebesar 1,59% (yoy). Dari sisi pembiayaan, kredit pertanian dan kehutanan mengalami pertumbuhan sebesar 20,95% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tumbuh 2022 yang tumbuh sebesar 21,39% (yoy). Kredit perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 8,17% (yoy) atau menurun dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 12,39% (yoy) namun masih tumbuh positif seiring dengan pemulihan konsumsi masyarakat yang mengakibatkan permintaan akan komoditas hasil pertanian dan perikanan, Lapangan Usaha Pertanian dan Kehutanan serta Perikananturut kembali tumbuh untuk memenuhi permintaan dari masyarakat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH

Realisasi pendapatan APBN triwulan II 2022 di Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 16,03% (yoy) dibanding triwulan II 2021. Dari sisi belanja, tingkat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat juga turut meningkat dari 36,17% pada triwulan II 2021 menjadi 38,46% pada triwulan II 2022.

Realisasi pendapatan APBD seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua Barat tahun 2022 meningkat sebesar 16,66% (yoy). Peningkatan pendapatan ini didorong oleh peningkatan realisasi TKDD dari sisi APBN. Namun realisasi belanja APBD mengalami penurunan sebesar -2,95% (yoy) seiring dengan penurunan pagu belanja APBD tahun 2022. Penurunan ini utamanya disumbangkan oleh Belanja Transfer ke Pemerintah Desa yang menurun dari 22,77% pada triwulan II 2021 menjadi 16,01% pada triwulan II 2022.

No	Uraian	Pagu (Rp Miliar)		% Perubahan (yoy)	s.d. TW II 2021		s.d. TW II 2022		% Perubahan (yoy)
		2021	2022		Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	
1.	Pendapatan Negara	3242.44	2972.81	-8.32%	1009.53	31.13%	1171.35	39.40%	16.03%
1.1.	Pendapatan Perpajakan	2916.76	2692.94	-7.67%	865.79	29.68%	988.45	36.71%	14.17%
1.2.	PNBP	326.02	280.16	-14.07%	143.74	44.09%	182.9	65.28%	27.24%
2.	Belanja Negara	27078.84	27457.87	1.40%	9795.68	36.17%	10559.5	38.46%	7.80%
2.1.	Belanja Pemerintah Pusat	9086.81	7847.37	-13.64%	3505.21	38.57%	2735.35	34.86%	-21.96%
2.1.1.	Belanja Pegawai	2113.20	2266.82	7.27%	1045.75	49.49%	1106.87	48.83%	5.84%
2.1.2.	Belanja Barang	2826.06	2608.75	-7.69%	1053.64	37.28%	919.94	35.26%	-12.69%
2.1.3.	Belanja Modal	4126.93	2950.96	-28.50%	1403.50	34.01%	705.97	23.92%	-49.70%
2.1.4.	Belanja Bansos	4.80	5.12	6.67%	2.24	46.67%	2.43	47.46%	8.48%
2.1.5.	Belanja Lain-Lain	15.84	15.72	-0.76%	0.07	0.44%	0.13	0.83%	85.71%
2.2.	TKDD	17992.03	19610.51	9.00%	6290.47	34.96%	7824.16	39.90%	24.38%
2.2.1.	DAU	7479.75	7486.77	0.09%	3429.47	45.85%	4027.78	53.80%	17.45%
2.2.2.	DBH	2444.17	3012.03	23.23%	552.71	22.61%	1081.2	35.90%	95.62%
2.2.3.	DAK	2309.83	3033.72	31.34%	506.16	21.91%	717.33	23.65%	41.72%
2.2.4.	DID	191.52	25.54	-86.66%	95.76	50.00%	12.77	50.00%	0.00%
2.2.5.	Dana Otsus	4015.25	4688.67	16.77%	1204.58	30.00%	1406.6	30.00%	0.00%
2.2.6.	Dana Desa	1551.50	1363.77	-12.10%	501.80	32.34%	578.48	42.42%	15.28%

Sumber: DJPb, diolah

Tabel 2.1. APBN Provinsi Papua Barat 2022

2.1. APBN PROVINSI PAPUA BARAT

STRUKTUR BELANJA APBN

Pagu Belanja Negara APBN di Provinsi Papua Barat tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 seiring dengan upaya pemulihan fiskal selama pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Pagu Belanja Negara APBN 2022 meningkat sebesar 1,40% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 9,00% (yoy). Namun, pagu Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 menurun sebesar -13,64% atau menjadi Rp7,84 triliun dari Rp9,08 triliun pada 2021. Turunnya alokasi pada belanja tersebut merupakan konsekuensi pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang masih berlangsung.

Dalam rincian alokasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022, pagu Belanja Pegawai meningkat sebesar 7,27% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan jumlah PNS tahun 2022 dan penambahan penerima THR PNS tahun 2022 yang meliputi keseluruhan ASN yang disertai penambahan tunjangan kinerja.

Sementara itu, pagu Belanja Modal mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp4,13 triliun menjadi Rp2,95 triliun pada tahun 2022 atau turun sebesar -28,50%. Belanja Modal merupakan salah satu instrumen utama untuk menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, dan mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pagu Belanja Modal tentu berdampak kepada penurunan realisasi Belanja Modal yang tercatat mengalami penurunan nilai sebesar -49,70% (yoy). Belanja Modal di Papua Barat digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti jalan trans papua, jalan lintas perbatasan, dan jaringan air pipa-sanitasi yang sudah mulai mencapai tahap akhir dari kontrak *multiyear* yang disepakati.

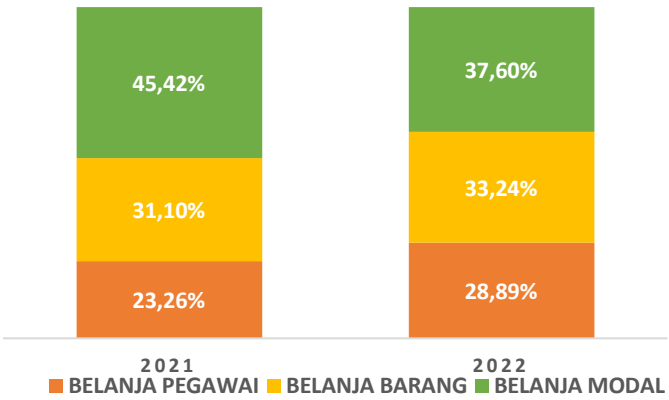

Sumber: DJPb, diolah
Grafik 2.1. Proporsi Pagu Belanja APBN Papua Barat

Dari sisi rincian pagu TKDD, peningkatan terjadi pada pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 31,34%, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 23,23% (yoy), dan Dana Otsus sebesar 16,77% yang sangat berdampak terhadap peningkatan keseluruhan alokasi. Peningkatan pagu DAK ini merupakan akibat dari percepatan penyelesaian proyek Trans Papua sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Adapun peningkatan pagu DBH merupakan akibat proyeksi penerimaan yang ditetapkan lebih besar sesuai dengan realisasi penerimaan di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) tetap termotivasi untuk mandiri dan menciptakan *creative financing* seperti pinjaman daerah atau kerja sama antar daerah dengan tujuan untuk mewujudkan target pembangunan sebagaimana RPJMD dan RKPD.

REALISASI BELANJA APBN

Kinerja realisasi penyerapan APBN di Provinsi Papua Barat pada Triwulan II 2022 secara umum menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat pada APBN hingga triwulan II 2022 mencapai 34,86% atau senilai Rp2,75 triliun. Realisasi ini lebih rendah -21,96% (yoy) dibandingkan realisasi belanja triwulan II 2021 yang mencapai Rp3,51 triliun atau 38,57% dari pagu belanja pemerintah pusat.

Berdasarkan alokasi belanja, nominal realisasi belanja pegawai tercatat paling besar mencapai Rp1,11 triliun atau 48,83%% dari pagu. Selanjutnya secara berurutan, realisasi belanja barang sebesar Rp919,94 miliar atau 35,26% dari pagu, belanja modal sebesar Rp705,97 miliar atau 23,92% dari pagu, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp2,43 miliar atau 47,46% dari pagu. Setiap komponen belanja tersebut secara umum memiliki nilai realisasi yang lebih rendah dibanding triwulan II 2021 kecuali Belanja Bansos dan Belanja Lain-Lain.

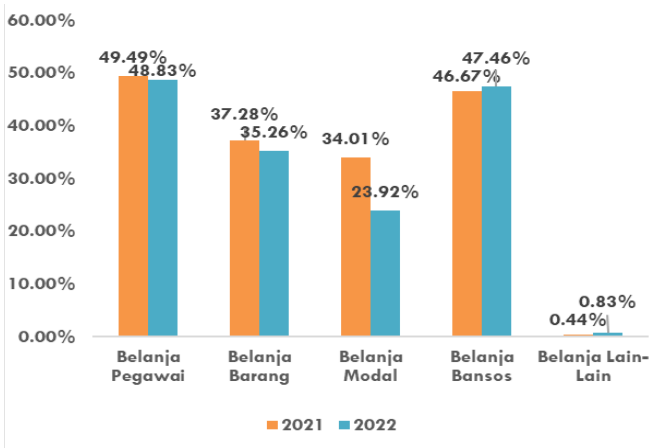

Sumber: DJPB, diolah
Grafik 2.2. Realisasi APBN Papua Barat Triwulan II 2022 (%)

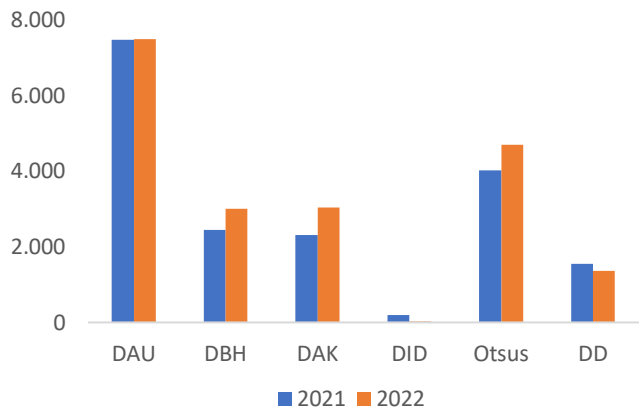

Sumber: DJPb, diolah
Grafik 2.3. Realisasi TKDD Papua Barat Triwulan II 2022

No	Uraian	Pagu (Rp Miliar)		% Perubahan (yoy)	s.d. TW II 2021		s.d. TW II 2022		% Perubahan (yoy)
		2021	2022		Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	
1.	Pendapatan	20.572.99	21.599.60	4.99%	7.110.76	34.56%	8.313.71	38.49%	16.92%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.314.07	1.288.30	-1.96%	447.48	34.05%	342.83	26.61%	-23.39%
1.2.	Pendapatan Transfer	19.034.53	20.212.81	6.19%	6.620.68	34.78%	7.966.67	39.41%	20.33%
1.3.	Lain-Lain PD yang Sah	224.39	98.49	-56.11%	42.60	18.98%	4.21	4.27%	-90.12%
2.	Belanja	24.019.76	22.168.94	-7.71%	4.688.06	19.52%	4.549.93	20.52%	-2.95%
2.1.	Belanja Pegawai	4.732.49	5.275.45	11.47%	1.863.46	39.38%	1.590.80	30.15%	-14.63%
2.2.	Belanja Barang	6.390.91	6.070.57	-5.01%	879.27	13.76%	1.415.82	23.32%	61.02%
2.3.	Belanja Bunga	42.79	51.05	19.30%	21.81	50.97%	24.42	47.84%	11.97%
2.4.	Belanja Subsidi	7.72	20.57	166.45%	0.90	11.66%	4.17	20.27%	363.33%
2.5.	Belanja Hibah	1.992.20	1.494.95	-24.96%	359.04	18.02%	442.53	29.60%	23.25%
2.6.	Belanja Bantuan Sosial	403.07	346.70	-13.99%	70.44	17.48%	85.21	24.58%	20.97%
2.7.	Belanja Modal	5.953.55	5.765.59	-3.16%	483.15	8.12%	458.24	7.95%	-5.16%
2.8.	Belanja Tidak Terduga	286.67	198.31	-30.82%	51.27	17.88%	57.08	28.78%	11.33%
2.9.	Belanja Transfer	4.210.37	2.945.74	-30.04%	958.71	22.77%	471.65	16.01%	-50.80%
3.	Pembiayaan Netto	2.707.59	447.15	-83.49%	1.780.08	65.74%	(347.90)	-77.80%	-119.54%
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.194.95	1.311.72	-58.94%	2.057.69	64.40%	-	0.00%	-100.00%
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	487.36	864.57	77.40%	277.61	56.96%	347.90	40.24%	25.32%
4.	SiLPA/SiKPA	(739.18)	(122.19)	-83.47%	642.63	-86.94%	4.111.68	-3364.99%	539.82%

Sumber: DJPb, diolah

Tabel 2.2. APBD Seluruh Pemerintah Daerah Papua Barat 2021

Dari sisi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi hingga triwulan II 2022 mencapai Rp7,82 triliun atau 39,90% dari pagu TKDD 2022. Persentase realisasi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi triwulan II 2021 yang tercatat sebesar Rp6,29 triliun atau sebesar 34,96% dari pagu TKDD 2021. Secara nilai, pada triwulan II 2022 realisasi TKDD meningkatan sebesar 24,38% (yoy) dibandingkan triwulan II 2021. Pada komponen TKDD, komponen dengan realisasi tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tata pemerintahan serta diperuntukkan bagi dukungan program vaksinasi dan pemberian insentif tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19.

2.2. APBD DI PROVINSI PAPUA BARAT

PENDAPATAN APBD

Target Pendapatan APBD seluruh Pemda Papua Barat mengalami peningkatan 4.99% dari yang sebelumnya Rp20,57 triliun pada 2021 menjadi Rp21,60 triliun pada 2022. Pendapatan Transfer, sumber pendapatan utama APBD Provinsi Papua Barat, mengalami peningkatan pagu dari Rp19,03 triliun pada 2021 menjadi Rp20,21 triliun pada 2022 atau meningkat 6,19% (yoy).

Realisasi Pendapatan APBD triwulan II 2022 tercatat sebesar Rp8,31 triliun (38,49%), lebih tinggi baik secara nominal maupun persentase jika dibanding realisasi Pendapatan APBD triwulan II 2021 yang sebesar Rp7,11 triliun (34,56%). Peningkatan nominal pendapatan APBD utamanya bersumber dari realisasi komponen Pendapatan Transfer sebesar Rp7,97 triliun, lebih tinggi dibanding realisasi triwulan II 2021 yang sebesar Rp6,62 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan APBD juga berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat Rp342,83 miliar.

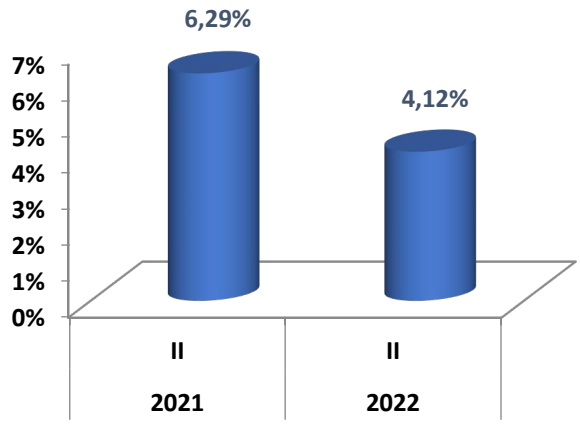

Sumber: DJPb, diolah
Grafik 2.4. Derajat Desentralisasi

Secara persentase, jumlah ini lebih rendah -23.32% (yoy) secara nominal bila dibandingkan dengan realisasi PAD triwulan II 2021 yang sebesar Rp447,48 miliar atau 34,05% dari pagu.

Berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah[1] yang merupakan perhitungan dari realisasi PAD dengan targetnya hingga triwulan II 2022 tercatat sebesar 38,49%. Efektivitas keuangan daerah ini meningkat dibanding triwulan II 2021 yang mencapai 34,56%. Peningkatan tersebut dikontribusikan seiring dengan peningkatan realisasi Pendapatan Transfer dan PAD triwulan II 2022. Apabila realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan secara umum, derajat desentralisasi[2] seluruh Pemerintah Daerah Papua Barat tercatat sebesar 4,12% atau menurun jika dibandingkan dengan derajat desentralisasi triwulan II 2021 yang tercatat 6,29%.

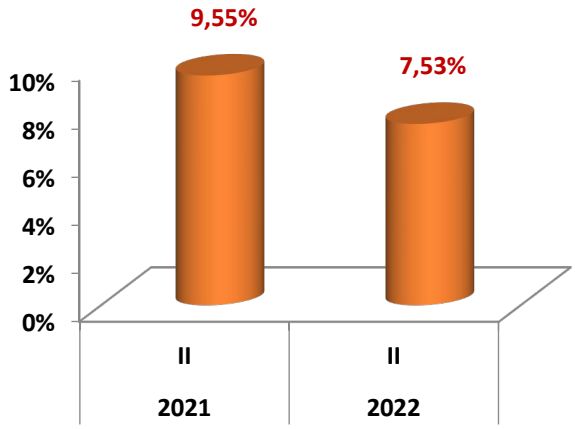

Sumber: DJPb, diolah
Grafik 2.5. Ketahanan Fiskal

Selanjutnya, rasio kemandirian keuangan daerah[3] Provinsi Papua Barat pada periode laporan tercatat 4,30%, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 6,76%. Tingkat ketahanan fiskal[4] tercatat 7,53%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang sebesar 0%. Derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan ketahanan fiskal Papua Barat yang tergolong cukup rendah menggambarkan Pemerintah Daerah Papua Barat masih bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

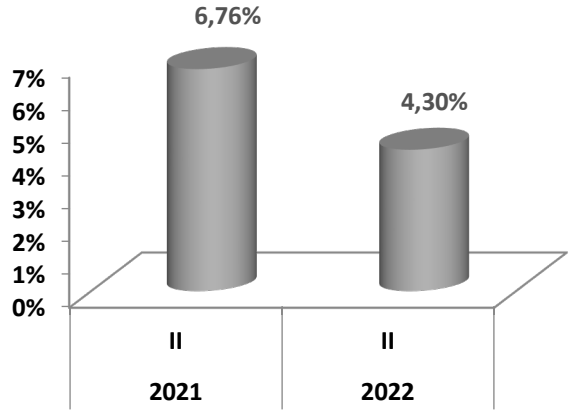

Sumber: DJPb, diolah
Grafik 2.6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

[1]Efektivitas Keuangan Daerah (Efektivitas PAD) merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan asli daerah yang dianggarkan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerahnya.

[2]Derajat Desentralisasi merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), semakin tinggi rasio yang dimiliki maka semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai belanja pemerintah.

[3]Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan pada periode yang sama. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan belanja daerahnya.

[4] Ketahanan Fiskal merupakan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja daerah

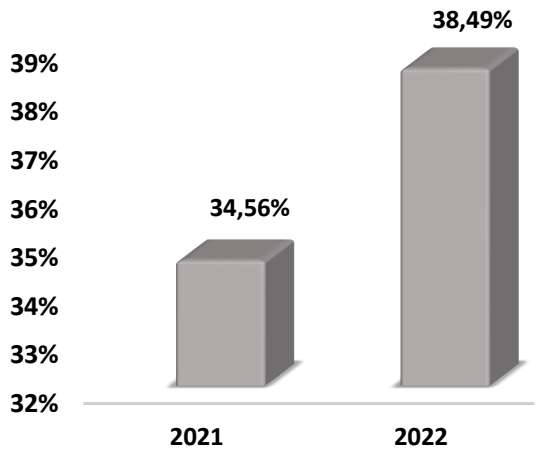

Sumber: DJPb, diolah
Grafik 2.7. Efektivitas Pendapatan Daerah

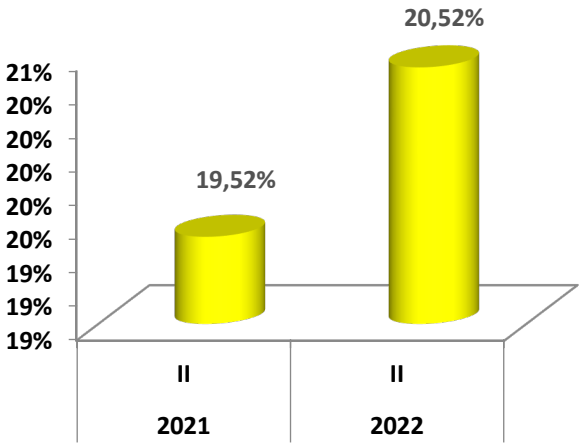

Sumber: DJPb Papua Barat, diolah
Grafik 2.8. Rasio Realisasi Belanja Daerah

BELANJA APBD

Pagu belanja APBD seluruh Pemda Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp21,10 triliun, menurun sebesar -12,18% (yoy) bila dibandingkan dengan pagu belanja tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp24,02 triliun. Penurunan pagu yang terjadi pada hampir keseluruhan jenis belanja disebabkan oleh penyesuaian terhadap alokasi belanja sebagaimana besaran serapan tahun 2021 yang kurang optimal (79,00%).

Realisasi belanja APBD pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp914,43 miliar, lebih tinggi 14,71% (yoy) bila dibandingkan dengan realisasi belanja APBD triwulan I 2021 yang sebesar Rp797,15 miliar. Peningkatan realisasi belanja APBD Provinsi Papua Barat disebabkan oleh peningkatan realisasi di sebagian besar belanja (kecuali belanja modal dan belanja tidak terduga).

DJPb Papua Barat mengungkapkan bahwa sebagian besar realisasi belanja bersumber dari peningkatan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Hal ini terjadi seiring dengan relaksasi mobilitas masyarakat yang menyebabkan peningkatan perjalanan dinas dan kegiatan kedinasan lainnya, serta penambahan jumlah PNS yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penerima THR serta tunjangan kinerja.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB III: INFLASI

Pada triwulan II 2022, inflasi Papua Barat tercatat sebesar 2,91% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,83% (yoy) seiring dengan momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1443H serta pelonggaran restriksi mobilisasi masyarakat. Inflasi Papua Barat 2022 tetap terkendali dengan pencapaian sampai dengan triwulan II 2022 sebesar 2,21% (ytd) dan tetap berada dalam rentang sasaran 3±1%. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Papua Barat, laju inflasi di Kota Sorong tercatat sebesar 2,62% (yoy) atau 1,92% (ytd), sementara inflasi di Kabupaten Manokwari tercatat relatif lebih tinggi sebesar 3,98% (yoy) atau 3,26% (ytd). Inflasi Papua Barat pada triwulan III 2022 diprakirakan meningkat dibanding triwulan II 2022 seiring dengan peningkatan harga komoditas global seiring dengan geotensi politik. Adanya prakiraan peningkatan inflasi mendorong TPID Provinsi Papua Barat melakukan koordinasi dan sinergi secara lebih intensif dalam upaya mengarahkan inflasi berada pada sasaran inflasi 2022 sebesar 3%±1% (yoy) melalui strategi 4K pengendalian inflasi.

INFLASI TRIWULANAN	INFLASI TAHUN KALENDER	INFLASI TAHUNAN
2,31%	2,21%	2,91%
Triwulan II 2022 (qtq)	Triwulan II 2022 (ytd)	Triwulan II 2022 (yoy)

INFLASI TRIWULANAN	INFLASI TAHUN KALENDER	INFLASI TAHUNAN
2,23%	2,76%	3,28%
Triwulan II 2021 (qtq)	Triwulan II 2021 (ytd)	Triwulan II 2021 (yoy)

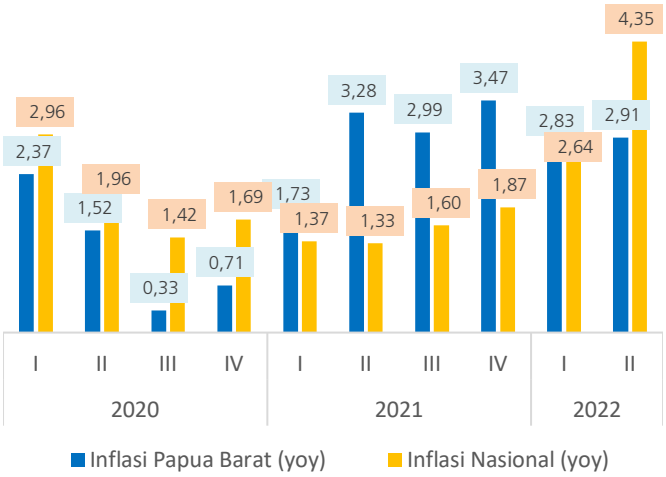

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.1. Inflasi Tahunan Papua Barat dan Nasional

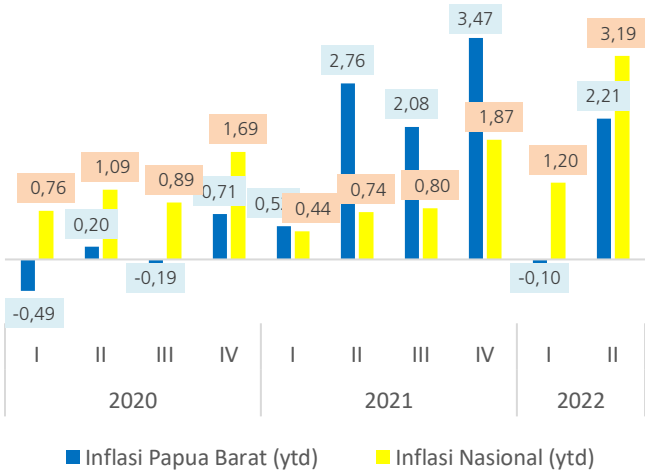

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2. Inflasi Tahun Kalender Papua Barat dan Nasional

3.1. Perkembangan Inflasi

Inflasi Papua Barat pada triwulan II 2022 Papua Barat tercatat sebesar 2,91% (yoy). Tingkat inflasi ini meningkat bila dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,83% (yoy) namun masih lebih rendah dibanding triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 3,28% (yoy). Inflasi Papua Barat juga tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional sebesar 4,35% (yoy). Peningkatan inflasi di Papua Barat terjadi didorong oleh momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H serta periode libur anak sekolah dan tahun ajaran baru. Inflasi pada triwulan II 2022 masih lebih rendah dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan perbedaan kondisi kebijakan restriksi mobilitas masyarakat, diantaranya kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk mudik serta cuti bersama yang mendorong konsumsi masyarakat pendatang ke luar Papua Barat.

Meskipun terkendali, terdapat beberapa kelompok yang berada di atas target sasaran nasional (3%±1%, yoy) yaitu Kelompok Transportasi sebesar 11,53% (yoy); Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 8,96% (yoy); Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,60% (yoy), serta Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 4,69%.

Bila dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional dan inflasi tahun sebelumnya, inflasi Papua Barat secara tahun kalender tercatat lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan inflasi kalender nasional yang mengalami inflasi sebesar 3,19% (ytd) serta masih lebih rendah dibanding triwulan II 2021 yang mencatatkan angka sebesar 2,76% (ytd). Dari fenomena yang terjadi, inflasi pada triwulan II 2022 juga didorong oleh kenaikan harga minyak secara global yang disebabkan oleh disrupsi pasokan minyak dari Rusia seiring dengan geotensi Rusia-Ukraina. Peningkatan harga minyak global mendorong Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) meningkatkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor maupun angkutan udara.

Kenaikan harga minyak global menjadi faktor pendorong inflasi Jasa Angkutan Penumpang, dalam hal ini ialah komoditas Angkutan Udara yang mengalami inflasi sebesar 32,66% (yoy) atau 10,61% (ytd). Mengutip data PT Pertamina (Persero), harga Avtur terus mengalami kenaikan dari bulan Januari 2022 hingga Juni 2022, dengan harga rata-rata dari Rp10.654,98/liter pada Januari 2022 mencapai Rp16.555,88/liter pada Juni 2022.

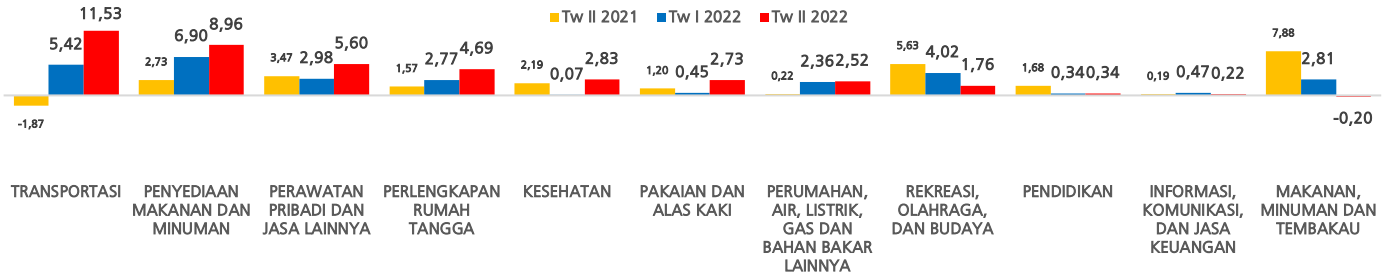

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.3. Inflasi Tahunan berdasarkan kelompok pengeluaran

Menanggapi kenaikan harga bahan bakar pesawat atau Avtur, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai mengenakan biaya tambahan (*fuel surchage*) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (*Fuel Surchage*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang belaku sejak tanggal 18 April 2022. Ketentuan ini menyebabkan maskapai angkutan udara menyesuaikan biaya tarif angkutan udara sehingga berdampak pada peningkatan inflasi Angkutan Udara.

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok

Kelompok Transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 11,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2022 yang sebesar 5,42% (yoy) ataupun pada triwulan II 2021 yang tercatat sebesar -1,87% (yoy). Peningkatan harga tertinggi tercatat berasal dari Angkutan Udara yang tercatat inflasi sebesar 32,66% yoy). Kelompok Transportasi mengalami peningkatan inflasi seiring dengan HBKN Idul Fitri 1443H, Idul Adha 1443H dan hari libur anak sekolah. Pada tahun 2021, restriksi mobilitas masyarakat selama HBKN Idul Fitri 1442H masih berlangsung dan masyarakat dilarang melakukan perjalanan mudik selama periode lebaran. Pada tahun 2022, Pemerintah melonggarkan restriksi mobilitas masyarakat selama HBKN Idul Fitri 1443H sehingga masyarakat melakukan perjalanan mudik untuk merayakan lebaran bersama dengan keluarga.

Salah satu faktor pendorong peningkatan inflasi angkutan udara pada triwulan II 2022 adalah berlangsungnya *side event* G20 Indonesia yaitu W20 dan Y20 yang berlangsung di Kab. Manokwari dan menjadi faktor penarik (*pull factor)* peningkatan permintaan jasa angkutan udara. Dari sisi pendorong *(push factor)*, inflasi angkutan udara disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakar angkutan udara atau avtur di level internasional yang mencapai harga rata-rata per Juni 2022 Rp16.555,88/liter atau naik 55,38% dibandingkan harga rata rata di bulan Januari 2022.

Inflasi pada Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 8,96% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 6,90% (yoy) ataupun triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 2,73% (yoy). Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman tertinggi berasal dari komoditas Ikan Bakar yang tercatat inflasi sebesar 36,30% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman mengalami inflasi seiring dengan fenomena HBKN Idul Fitri 1443H dan relaksasi restriksi mobilitas masyarakat yang membuat mobilitas masyarakat meningkat pada sektor Penjual Bahan Makanan dan Farmasi sebesar 62,70 dibandingkan Triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 51,52 maupun Triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 35,72.

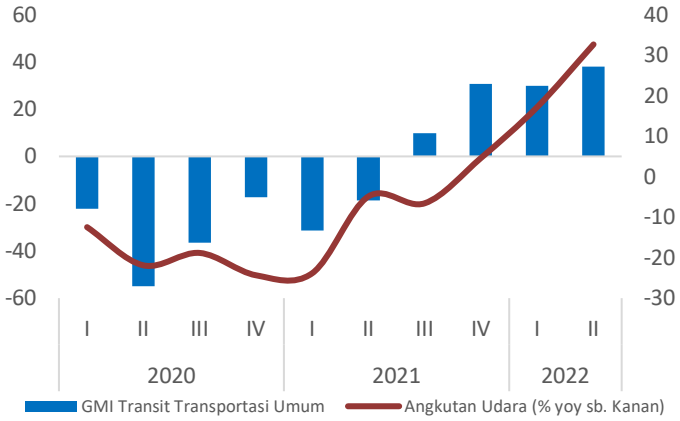

Sumber: BPS & Google, diolah
Grafik 3.4. Inflasi Angkutan Udara

Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 5,60% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,98% (yoy) maupun triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 3,47% (yoy). Inflasi kelompok ini disumbang terbesar oleh subkelompok Perawatan Pribadi yang mencatatkan inflasi sebesar 7,23% (yoy). Peningkatan inflasi tersebut disebabkan seiring dengan relaksasi restriksi mobilitas masyarakat selama HBKN Idul Fitri 1443H dan periode tahun ajaran baru untuk anak sekolah sehingga permintaan akan komoditas yang berkaitan dengan perawatan pribadi turut meningkat.

Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 2,52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,36% (yoy) maupun triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 0,22% (yoy). Inflasi kelompok ini disebabkan oleh inflasi komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sebesar 17,96% (yoy). Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya mengalami peningkatan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan meningkatnya harga LPG nonsubsidi secara bertahap oleh Pertamina. Harga LPG nonsubsidi per tanggal 27 Februari 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp 15.500 per kg dari sebelumnya Rp 13.500 per kg. Kenaikan harga LPG Nonsubsidi tersebut mengakibatkan harga jual Elpiji 12 kg dan *Bright Gas* 5,5 kg di tingkat agen mengalami kenaikan, inflasi komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) ini juga turut didorong oleh tingginya biaya distribusi LPG di mana LPG di Provinsi Papua Barat diimpor dari luar Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) dalam tahapan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kota Sorong untuk menekan inflasi harga elpiji serta memperlancar distribusi LPG hingga pelosok nusantara.

3.3. Inflasi Menurut Kota IHK

Inflasi Kota Sorong pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 2,62% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 2,73% (yoy), dan triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 3,65% (yoy). Penurunan tingkat inflasi di Kota Sorong didorong oleh relaksasi restriksi mobilitas masyarakat selama HBKN Idul Fitri 1443H, Idul Adha 1443H dan pemberlakuan cuti bersama sehingga konsumsi masyarakat pendatang keluar dari Provinsi Papua Barat yang mengakibatkan pengurangan jumlah tingkat permintaan secara umum. Inflasi yang terjadi di Kota Sorong pada triwulan II 2022 disebabkan oleh inflasi pada komoditas angkutan udara, bawang merah, tomat, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, dan komoditas lainnya.

Inflasi Kabupaten Manokwari mencatatkan inflasi sebesar 3,98% (yoy), meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 3,17% (yoy) serta lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2021 yang tercatat sebesar 1,99% (yoy). Peningkatan inflasi dibanding triwulan I 2022 terjadi didorong oleh momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H. Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Manokwari disumbang oleh komoditas angkutan udara, daging babi, kue kering berminyak, rokok kretek filter, minyak goreng, dan komoditas lainnya.

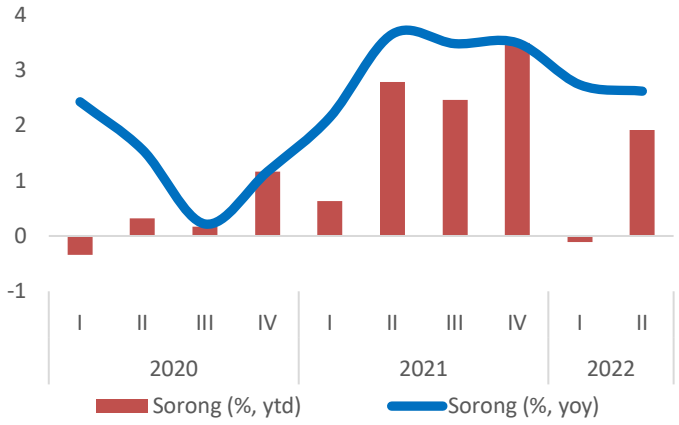

Sumber: BPS, diolah
Grafik 3.5. Inflasi Kota Sorong

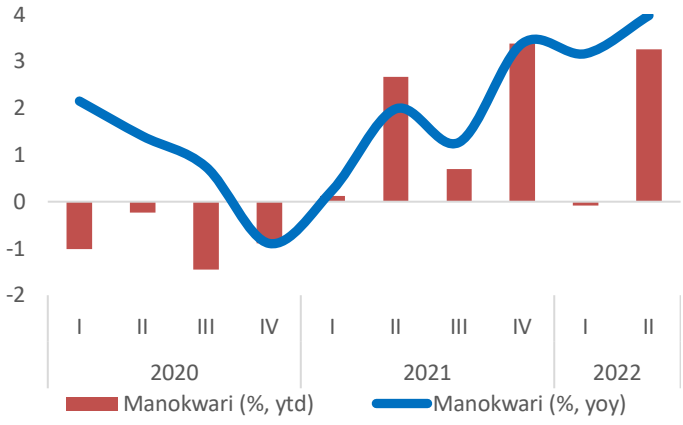

Sumber: BPS, diolah
Grafik 3.6. Inflasi Kabupaten Manokwari

3.4. Perkembangan Inflasi Triwulan III 2022

Pada Juli 2022, Papua Barat mengalami inflasi sebesar 1,11% (mtm) atau 2,97% (yoy). Jika dibandingkan dengan inflasi bulanan pada Juli 2021 yang tercatat sebesar 1,05% (mtm) atau 4,13% (yoy), laju inflasi pada Juli 2022 tercatat masih lebih tinggi secara bulanan. Inflasi periode ini didorong oleh peningkatan indeks harga pada kelompok transportasi umum. Hal ini didorong oleh sentimen positif masyarakat terhadap pelonggaran kebijakan restriksi mobilisasi selama COVID-19 dan juga sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar angkutan udara atau avtur secara global.

Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan tertinggi didorong oleh Kelompok Transportasi. Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 8,03% (mtm) atau 20,62% (yoy) dengan andil bulanan sebesar 0,97%. Inflasi pada kelompok ini dipengaruhi oleh subkelompok jasa angkutan penumpang dengan inflasi sebesar 15,26% (mtm) yang tercatat lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 8,61% (mtm). Komoditas dengan andil tertinggi dalam menyumbang inflasi adalah komoditas angkutan udara dengan inflasi sebesar 21,20% (mtm) atau 61,69% (yoy).

Peningkatan harga pada kelompok ini turut didorong oleh kenaikan harga BBM, khususnya avtur dan juga pelonggaran aturan restriksi mobilisasi masyarakat seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang tidak mewajibkan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) untuk menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test antigen* bagi PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (*booster*) yang mulai berlaku efektif sejak 8 Maret 2022.

Adanya pelonggaran aturan restriksi mobilisasi masyarakat tersebut menjadi sentimen positif bagi masyarakat untuk bepergian sehingga permintaan akan angkutan udara mengalami peningkatan. Hal ini juga terlihat dari *Google Mobility Index* triwulan II 2022 yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat di Papua Barat yang berpergian.

Penyebab peningkatan harga pada komoditas Angkutan Udara disebabkan adanya tren kenaikan harga bahan bakar angkutan udara atau avtur pada tingkat global yang mencapai harga rata-rata per Juli 2022 Rp16.806 per liter atau naik 58 persen dibandingkan harga rata rata di bulan Januari 2022.

Kenaikan harga juga disebabkan oleh adanya pemberian izin kepada maskapai untuk mengenakan biaya tambahan (*fuel surchage*), sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (*Fuel Surchage*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang berlaku sejak tanggal 18 April 2022.

Secara spasial, inflasi di Provinsi Papua Barat didorong oleh inflasi di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Pada periode Juli 2022, Kabupaten Manokwari merupakan kota/kabupaten dengan tingkat inflasi ke-53 dan Kota Sorong merupakan kota/kabupaten dengan tingkat inflasi ke-12 se-Indonesia. Tingkat inflasi Kabupaten Manokwari berada pada peringkat ke-16 se-Sulampua dan Kota Sorong berada pada peringkat ke-7 sebagai kota inflasi dari 21 kota IHK se-Sulampua. Kota Sorong mencatat inflasi sebesar 1,26% (mtm) atau lebih tinggi dibanding dari Juni 2022 yang tercatat sebesar 0,39% (mtm) dan searah dengan Juli 2021 yang mengalami inflasi sebesar 1,51% (mtm). Kabupaten Manokwari mencatat inflasi sebesar 0,57% (mtm) atau lebih rendah dibanding Juni 2022 yang mencatat inflasi sebesar 0,71% (mtm) namun berbeda arah dengan Juli 2021 yang mencatat deflasi sebesar -0,59% (mtm).

3.5. Program Pengendalian Inflasi Daerah

Peningkatan inflasi tetap diprioritaskan untuk tetap berada pada kisaran sasaran 3±1% (yoy). Program pengendalian inflasi mengacu pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. TPID Provinsi Papua Barat pada triwulan IV 2021 telah melakukan beberapa penyesuaian pada program pengendalian inflasi melalui penyusunan *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2022-2024. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup, dan mudah dijangkau baik dari sisi fisik komoditas, maupun dari sisi harga, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Untuk mengendalikan inflasi selama tahun 2022, TPID Provinsi Papua Barat telah melakukan beberapa upaya di antaranya:

- Menyelenggarakan rapat konsinyering penyempurnaan *Roadmap* TPID Papua Barat 2022-2024 pada tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama OPD teknis.
- Menyelenggarakan rapat finalisasi *Roadmap* TPID Papua Barat 2022-2024 pada 8 Februari 2022 di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat bersama Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, dan OPD teknis terkait.
- Menyelenggarakan HLM TPID Papua Barat Maret 2022 pada 15 Maret 2022 di Kab. Manokwari bersama Wakil Gubernur Papua Barat, Biro Perekonomian Provinsi, serta OPD teknis terkait.
- Menyelenggarakan sidak minyak goreng pada 18 Maret 22 di sejumlah distributor di Manokwari (Makmur Perkasa, CV Aditya Persada, Orchid Swalayan, Pasar Sanggeng dan Hadi Swalayan) yang dipimpin oleh Gubernur Papua Barat dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan mengantisipasi kenaikan harga menjelang HBKN Idul Fitri.
- Rapat Koordinasi TPID dengan Kemendagri secara online pada 1 April 2022 membahas terkait persiapan HBKN Idul Fitri 1443 H.
- Melakukan Sidak Harga Bahan Pokok bersama Ditjen Perkebunan pada tanggal 25 April 2022 di Kabupaten Manokwari untuk mengecek ketersediaan pasokan dan mengatisipasi kenaikan harga menjelang HBKN Idul Fitri.

- Menggelar Pangan Murah bersama Ditjen Perkebunan selama tanggal 26-29 April 2022 di Kabupaten Manokwari.
- Menyelenggarakan HLM TPID Papua Barat Juni 2022 pada 27 Juni 2022 di Kab. Manokwari bersama Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, BPS Provinsi Papua Barat, Biro Perekonomian Provinsi Papua Barat, OPD teknis terkait, BULOG, pihak distributor, serta stakeholder terkait.
- Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pembahasan pengembangan SIDASSKEN (Sistem Informasi Data Sektoral Satu Noken) Provinsi Papua Barat pada 4 Juli 2022 bersama dengan BPS, Bappeda, Biro Perekonomian Provinsi Papua Barat, Kominfo Papua Barat, dan BigBox (anak perusahaan PT. Telkom Indonesia)
- Mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 pada Kamis, 18 Agustus 2022. Tindak lanjut TPID Provinsi Papua Barat antara lain:
  - Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga dari APBD untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya terkait Operasi pasar;
  - Memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.
  - Mengoptimalkan subsidi transportasi pangan dengan pemanfaatan program tol laut;
  - Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; serta
  - Mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB IV. PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2022 masih terjaga. Kredit korporasi mengalami penurunan akibat masih berlangsungnya pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, nilai aset dan DPK mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, kinerja sektor UMKM mengalami peningkatan yang mengindikasikan aktivitas perdagangan yang mulai tumbuh. Lebih lanjut, NPL masih terjaga pada level yang aman.

PERTUMBUHAN KREDIT KORPORASI -1,47% (yoy) -5,26% (yoy) Tw I 2022	PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA -2,43% (yoy) -6,49% (yoy) Tw I 2022	PERTUMBUHAN ASET -0,14% (yoy) -1,78% (yoy) Tw I 2022
LOAN-TO-DEPOSIT RATIO 95,22% (yoy) 99,59% (yoy) Tw I 2022	*NPL RATIO* 3,91% 3,62% Tw I 2022	PERTUMBUHAN KREDIT UMKM 17,79% (yoy) 15,51% (yoy) Tw I 2022

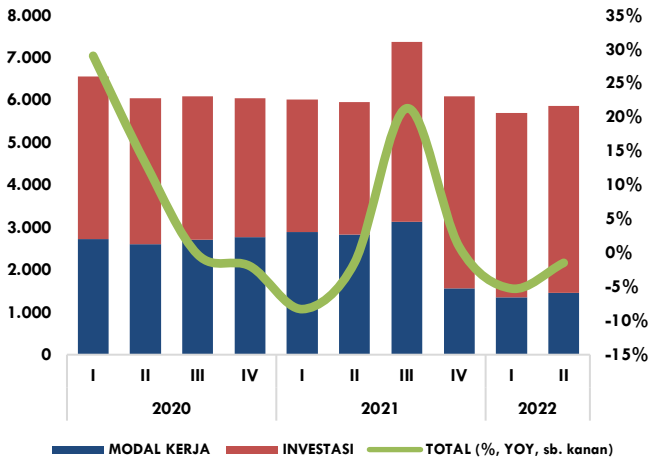

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.1. Pertumbuhan Kredit Korporasi

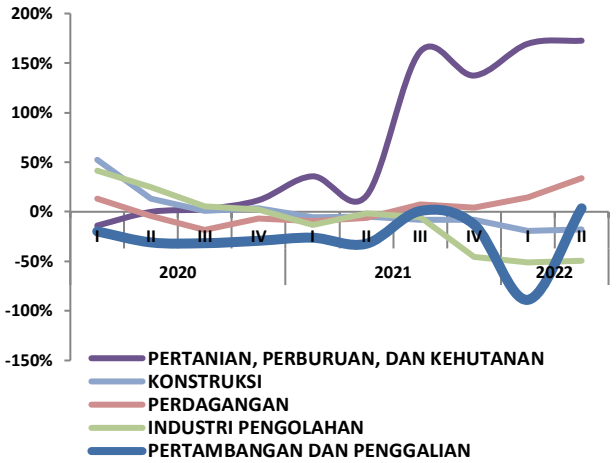

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.2.Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektoral

4.1. KEUANGAN KORPORASI

SUMBER KERENTANAN KORPORASI

Secara umum, kerentanan korporasi di Papua Barat bersumber dari faktor global maupun faktor domestik. Faktor global yang mempengaruhi kerentanan korporasi antara lain kondisi perekonomian mitra dagang ekspor. Faktor domestik yang memengaruhi antara lain perkembangan kasus COVID-19 dan mobilitas masyarakat. Faktor eksternal yang sangat terkait dengan lapangan usaha utama Papua Barat yaitu Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian.

EKSPOSUR PERBANKAN PADA SEKTOR KORPORASI

Kredit sektor korporasi pada triwulan II 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,47% (yoy). Meskipun masih berada pada rentang negatif, kinerja ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja pada triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar -5,26% (yoy). Total penyaluran kredit kepada sektor korporasi triwulan II 2022 tercatat sebesar Rp5,86 triliun atau meningkat dibanding triwulan I 2022 yang sebesar Rp5,70 triliun.

Penurunan kredit sektor korporasi terutama bersumber dari penurunan jumlah kredit modal kerja. Kredit modal kerja pada triwulan II 2022 tercatat menurun -48,33% (yoy). Total penyaluran kredit modal kerja pada periode ini adalah sebesar Rp1,46 triliun. Sementara itu, kredit investasi tumbuh positif 40,80% (yoy). Nilai kredit investasi saat ini sebesar Rp4,40 triliun lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,12 triliun. Besarnya pangsa kredit investasi membuat pertumbuhan kredit korporasi secara total meningkat. Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai menurun serta relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat serta pemulihan ekonomi domestik dan global mendorong peningkatan investasi oleh sektor korporasi.

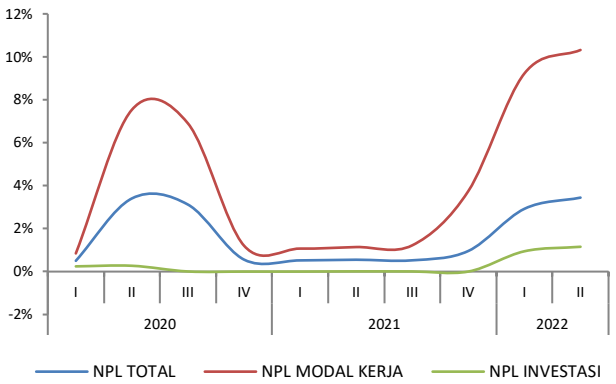

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.3. Perkembangan NPL Kredit Korporasi

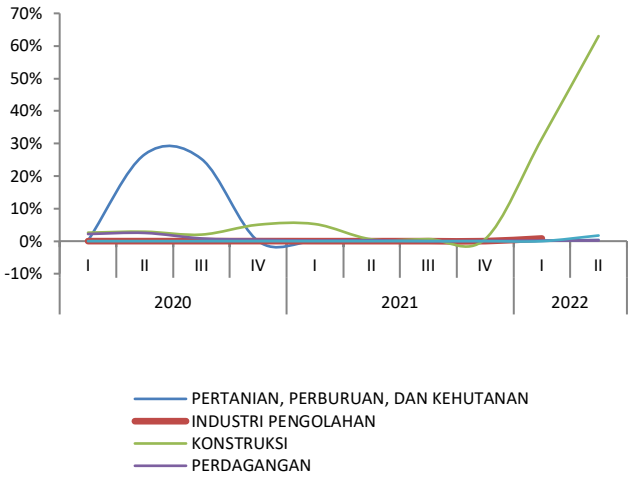

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.4. NPL Per Sektor Lapangan Usaha

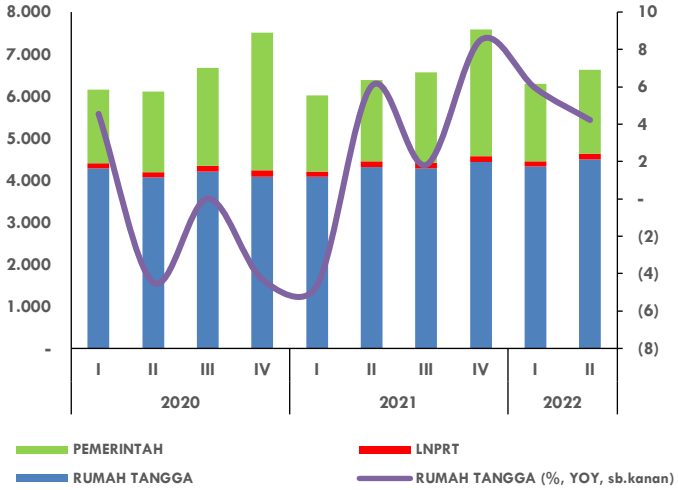

Sumber: BPS dan Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.5. NPL Per Sektor Pengeluaran

Pangsa terbesar penyaluran kredit sektor korporasi pada triwulan II 2022 berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan pangsa 35,64%. Selanjutnya adalah sektor industri pengolahan dengan pangsa sebesar 33,21%; sektor perdagangan dengan pangsa 11,33%; sektor konstruksi 8,05%; serta sektor transportasi dengan pangsa 7,32%. Kelima sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar kredit korporasi di Papua Barat. Secara tahunan, pertumbuhan kinerja kredit korporasi yang paling tinggi berasal dari sektor Perikanan yang tercatat 547,90% (yoy). Hal tersebut didukung oleh relaksasi mobilitas masyarakat yang mendorong pulihnya ekonomi rumah tangga serta tumbuhnya konsumsi rumah tangga yang salah satu dari konsumsi tersebut adalah konsumsi ikan. Kinerja ini sangat baik dan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang terkontraksi sebesar -15,51% (yoy). Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 172,60% (yoy) pada triwulan II 2022. Sementara itu, sektor Konstruksi dan sektor Industri Pengolahan menjadi penahan laju pertumbuhan pada kredit korporasi. Penyaluran kredit ke tiga sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif, masing-masing sebesar -17,80% (yoy), dan -49,20% (yoy).

Non Performing Loan **(NPL) kredit korporasi pada triwulan II 2022 secara total masih dalam batas aman.** NPL tercatat sebesar 3,44%, meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat 2,92% namun masih dibawah *threshold* 5%. Dari sisi jenis penggunaannya, meningkatnya rasio NPL bersumber dari meningkatnya rasio NPL kredit modal kerja, dari 9,23% pada triwulan I 2022 menjadi 10,32% pada periode laporan. Berdasarkan lapangan usaha, sektor konstruksi mencatatkan peningkatan rasio NPL yang tinggi menjadi 63,01% diakibatkan adanya kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan oleh para konstruktor swasta. Proyek konstruksi di Papua Barat masih didominasi oleh sektor Pemerintah sehingga pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang yang tertunda berdampak pada peningkatan NPL sektor konstruksi.

4.2. KEUANGAN RUMAH TANGGA

SUMBER KERENTANAN DAN KONDISI SEKTOR RUMAH TANGGA

PDRB konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh positif 4,22% (yoy). Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini menunjukkan kinerja positif walaupun lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 5,92% (yoy). PDRB konsumsi rumah tangga yang positif ini sejalan dengan Hasil Survei Konsumen (SK) KPw BI Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2022 yang menunjukkan bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi Papua Barat di atas level optimis.

Walaupun sebagian jenis kredit mengalami peningkatan, kredit multiguna masih memiliki pangsa terbesar pada triwulan II 2022. Pertumbuhan nilai kredit multiguna pada triwulan II 2022 meningkat 7,98% (yoy) dengan nominal mencapai Rp6,93 triliun dibandingkan triwulan I 2021 yang tercatat 9,17% (yoy) dengan nominal Rp6,84 triliun.

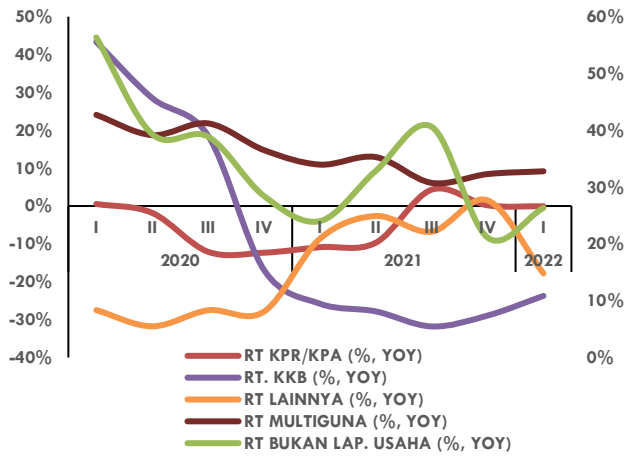

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.6. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga

EKSPOSUR PERBANKAN PADA SEKTOR RUMAH TANGGA

Berlawanan dengan PDRB konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan dari 5,92% (yoy) menjadi 4,22% (yoy) pada triwulan II 2022, kredit sektor rumah tangga meningkat 5,65% (yoy). Total kredit konsumsi yang diberikan kepada RT pada periode ini tercatat sebesar Rp9,43 triliun, yang meningkat dibanding dengan triwulan I 2022 yang tercatat sebesar Rp9,31 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,95% (yoy).

Dilihat dari komposisinya terhadap total kredit rumah tangga, kredit multiguna memiliki pangsa terbesar yaitu 73,48%, pangsa tersebut relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya. Pangsa kredit selanjutnya berturut-turut diikuti oleh KPR/KPA/Ruko sebesar 19,84%; kredit untuk peruntukan lainnya sebesar 3,03%; kredit bukan lapangan usaha lainnya 2,27%; dan terakhir kredit kendaraan bermotor sebesar 1,38%. Kredit multiguna digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat seiring dengan masa pemulihan dari pandemi COVID-19.

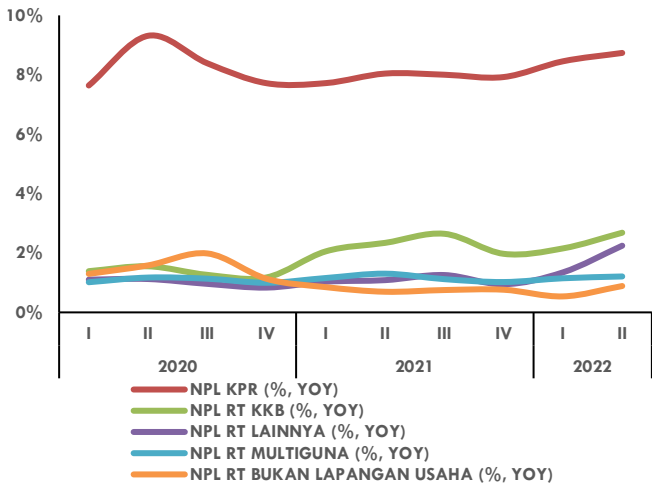

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.7. Pertumbuhan NPL Kredit Rumah Tangga

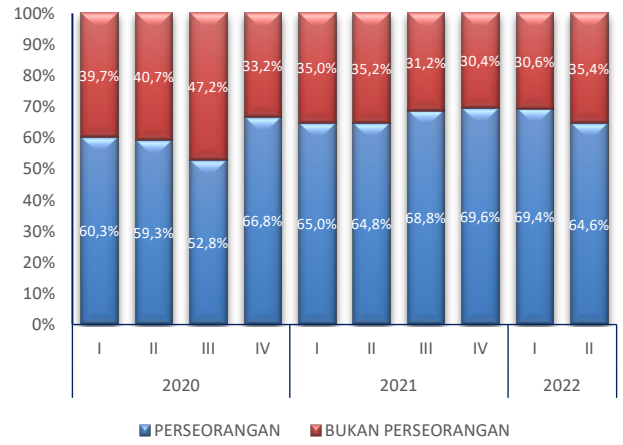

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.8. Pangsa DPK

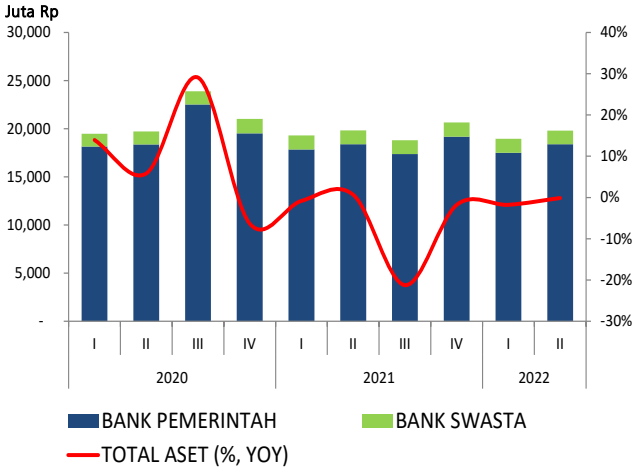

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.9. Perkembangan Aset Perbankan

Ditinjau dari eksposur risiko, kualitas kredit sektor rumah tangga pada triwulan II 2022 cenderung stabil. Secara total rasio, NPL kredit sektor RT berada pada level 2,75%. Namun, NPL (*gross*) KPR kembali menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 8,74% dibanding triwulan I 2022 yang berada pada level 8,45%. Ditinjau lebih lanjut, NPL KPR terbesar disumbang oleh KPR tipe 22 s.d. 70 yang menyumbang lebih dari 90% dari nilai NPL KPR. Pada umumnya, tipe rumah dengan ukuran 22 s.d. 70 merupakan tipe rumah yang menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sejalan dengan perbaikan perekonomian, masyarakat memiliki tendensi untuk membelanjakan uangnya, terlihat komposisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sektor rumah tangga yang menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari DPK sektor rumah tangga yang terkontraksi sebesar -2,34% (yoy). Searah dengan periode sebelumnya, produk tabungan masih tumbuh sebesar 0,70% (yoy), sementara produk deposito terkontraksi sebesar -1,12% (yoy). Pangsa terbesar DPK perseorangan di Papua Barat masih disumbang oleh produk tabungan sebesar 69,61%, diikuti produk deposito dengan pangsa 24,74% dan produk giro yang menyumbang pangsa sebesar 3,21%.

DPK sektor rumah tangga (perseorangan) masih mendominasi total DPK perbankan di Papua Barat dengan *share* 64,60% dari total DPK. Sedangkan 35,40% sisanya dimiliki oleh nasabah bukan perseorangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai lebih percaya diri dalam membelanjakan uangnya walaupun dengan prinsip kehati-hatian mengingat masih berlangsungnya proses pemulihan dari pandemi COVID-19. Selain itu, maraknya informasi dan edukasi tentang literasi keuangan juga membuka opsi masyarakat untuk mengubah pola investasi ke instrumen yang lebih *liquid*.

4.3. INSTITUSI PERBANKAN

Kinerja perbankan Papua Barat sampai dengan triwulan II 2022 secara umum menunjukkan perbaikan, meskipun beberapa indikator utama masih berada di angka negatif. Secara tahunan, Indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu nilai aset secara tahunan tercatat negatif, begitu pula nilai DPK menunjukkan angka negatif. Sementara itu, penyaluran kredit menunjukkan nilai pertumbuhan positif setiap periodenya.

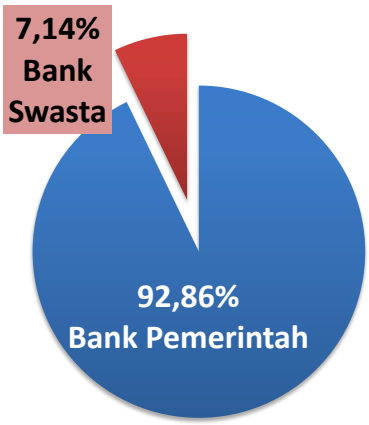

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.10. Pangsa Aset Perbankan

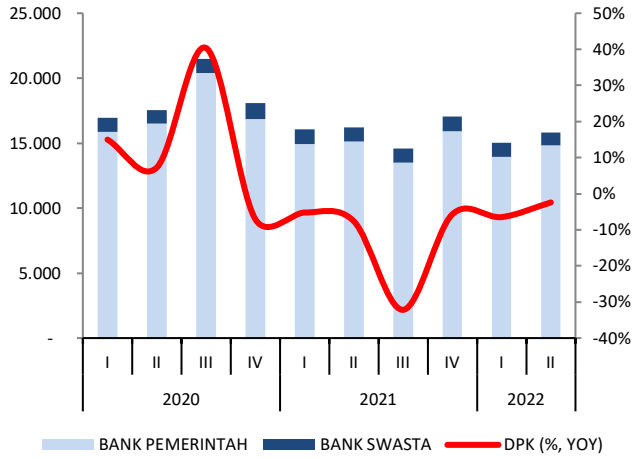

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.11. DPK menurut Kelompok Bank

Aset perbankan di Papua Barat tercatat mengalami penurunan sebesar -4,40% (yoy) dengan total nilai aset mencapai Rp19,81 triliun. Nilai DPK yang mencapai Rp15,82 triliun pada periode laporan, menunjukkan angka yang masih negatif sebesar -2,43% (yoy). Kinerja kredit masih dapat tumbuh positif 5,76% (yoy) dengan total penyaluran sebesar Rp15,07 triliun.

Penurunan kinerja perbankan, khususnya DPK, pada triwulan II 2022 didorong oleh pemulihan perekonomian seiring dengan relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat yang meningkatkan tendensi masyarakat untuk berbelanja. Lebih lanjut, kinerja *Loan to Deposit Ratio* menunjukkan angka yang masih berada di level cukup tinggi yaitu 95,22% pada periode laporan. Hal ini secara umum menunjukkan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi sudah optimal dalam melakukan penyaluran seluruh kreditnya kepada nasabah. Meskipun demikian, upaya penyaluran kredit kepada nasabah tetap memerlukan pengawasan secara intensif mengingat tingkat LDR yang berada di level yang cukup tinggi.

Dari sisi penyaluran kredit, NPL (*gross*) tercatat sedikit naik namun masih dalam batas aman yaitu dari 3,62% pada triwulan I 2022 menjadi 3,91% pada triwulan II 2022.

PERKEMBANGAN VOLUME USAHA

Aset perbankan di Papua Barat pada triwulan II 2022 terkontraksi -0,14% (yoy) sedikit membaik dibanding triwulan I 2022 yang terkontraksi lebih dalam sebesar -1,778% (yoy). Secara nominal, jumlah aset perbankan pada triwulan II 2022 mencapai Rp19,89 triliun atau meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat sebesar Rp18,96 triliun. Peningkatan turut didorong oleh momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1443 H serta cuti bersama serta pelonggaran restriksi mobilitas masyarakat. Dari seluruh aset perbankan di Papua Barat, kelompok bank pemerintah tercatat memiliki pangsa 93,63% dari keseluruhan total aset perbankan di Papua Barat.

Di posisi selanjutnya, pangsa aset kelompok bank swasta nasional tercatat hanya sebesar 6,37%. Pangsa aset perbankan masing-masing kelompok bank di Papua Barat relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

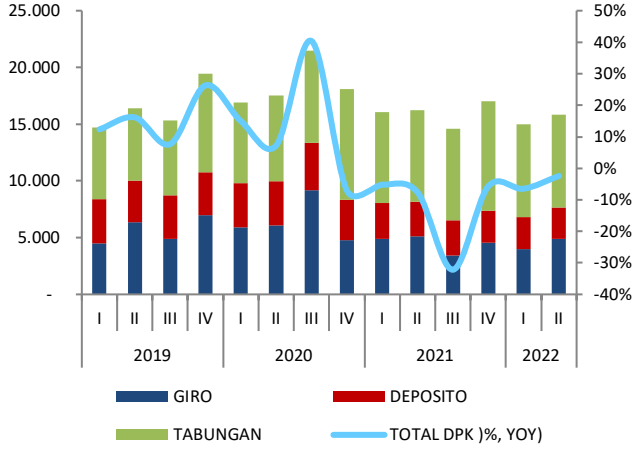

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.12. Klasifikasi DPK

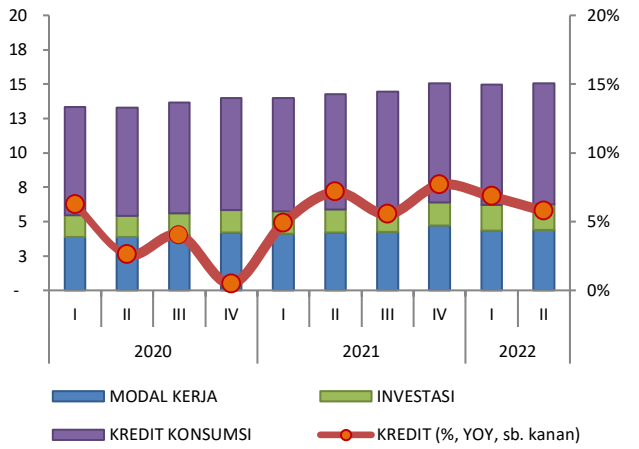

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.13. Kredit Perbankan

PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT

Kinerja penghimpunan dana masyarakat di Papua Barat pada triwulan II 2022 mengalami perbaikan. DPK perbankan Papua Barat pada periode laporan masih tercatat -2,43% (yoy), dari Rp16,22 triliun pada triwulan II 2021 menjadi Rp15,82 triliun pada triwulan laporan. Perbaikan total DPK pada triwulan II 2022 terutama terjadi pada produk giro yang membaik dari -17,89% (yoy) pada triwulan I 2022 menjadi -3,41% (yoy) pada triwulan II 2022. Lebih lanjut, peningkatan produk giro terutama terjadi pada giro milik bank pemerintah yang pada triwulan I 2022 sebesar Rp3,94 triliun menjadi Rp4,85 triliun.

Di sisi lain, produk deposito milik bank pemerintah membaik meskipun masih terkontraksi sebesar -8,63% (yoy). Lebih lanjut, penurunan giro bank pemerintah didorong oleh penurunan realisasi anggaran pemerintah yang berasal dari transfer dana pemerintah pusat serta masyarakat yang juga sudah mulai membelanjakan uangnya seiring dengan pelonggaran restriksi mobilitas masyarakat di masa HBKN Idul Fitri 1443 H. Sementara itu, produk tabungan secara tahunan menurun 1,20% (yoy) dari Rp8,05 triliun pada triwulan II 2021 menjadi Rp8,15 triliun pada triwulan II 2022.

PENYALURAN KREDIT

Penyaluran kredit pada triwulan II 2022 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,76% (yoy). Pertumbuhan tersebut berasal dari total kredit yang disalurkan pada triwulan II 2021 sebesar Rp14,25 triliun atau meningkat menjadi Rp15,07 triliun pada triwulan II 2022.

Pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis kredit. Kredit konsumsi yang memiliki pangsa terbesar tumbuh 5,29% (yoy) menjadi Rp8,83 triliun. Kredit modal kerja juga meningkat sebesar 3,73% (yoy) dengan total nilai Rp4,38 triliun. Kemudian, kredit investasi mengalami pertumbuhan paling signifikan sebesar 13,35% (yoy) dengan nilai Rp1,86 triliun.

Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit konsumsi masih menjadi produk yang paling banyak disalurkan kepada masyarakat dengan pangsa 58,58%. Hal ini perlu diwaspadai mengingat kredit konsumsi secara teori tidak memberikan imbal hasil kepada masyarakat. Lebih lanjut, 29,05% dari total kredit di Papua Barat digunakan untuk modal kerja dan sisanya sebesar 12,37% digunakan untuk tujuan investasi.

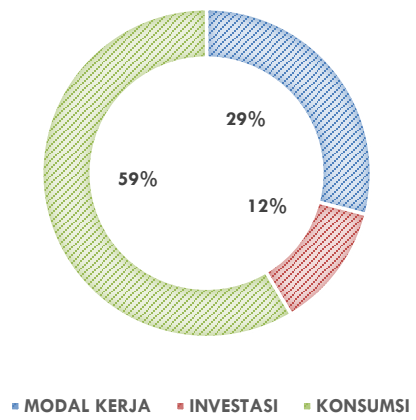

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.14. Komposisi Kredit Perbankan

Dilihat dari sektor ekonomi, pangsa pemberian kredit masih relatif sama dengan periode sebelumnya. Kredit terbesar masih didominasi oleh sektor rumah tangga & bukan lapangan usaha lainnya dengan pangsa sebesar 58,58%. Pangsa terbesar kedua berada pada sektor Perdagangan mencapai 19,85% diikuti sektor Pertanian yang pangsanya meningkat menjadi 5,54%. Selanjutnya sektor Konstruksi dengan pangsa 3,90%. Besarnya porsi pemberian kredit kepada Sektor Rumah Tangga mengindikasikan Sektor Rumah Tangga berperan sangat penting dalam pertumbuhan kredit perbankan di Papua Barat.

Kredit sektor pertanian merupakan kredit dengan pangsa terbesar ketiga mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,92% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh 21.39% (yoy). Kredit sektor perdagangan sebagai kredit dengan pangsa terbesar kedua mengalami pertumbuhan 7,26% (yoy). Sektor rumah tangga dan bukan lapangan usaha lainnya yang merupakan sektor dengan penyaluran kredit terbesar tumbuh sebesar 5,29% (yoy) tetapi lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh 6,00% (yoy). Namun, sektor konstruksi yang merupakan pangsa kredit terbesar keempat mengalami kontraksi -16,88% (yoy).

Secara umum, penyaluran kredit masih dapat tumbuh walaupun relatif kecil pada triwulan II 2022. Seiring dengan pemulihan ekonomi serta relaksasi mobilitas masyarakat, pergerakan ekonomi dan penyaluran kredit diperkirakan dapat meningkat dan mendorong aktivitas ekonomi dan bisnis di Papua Barat ke depan. Selanjutnya, suku bunga tertimbang DPK yang ditawarkan perbankan Papua Barat kepada nasabahnya pada triwulan II 2022 tercatat sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 1,29% menjadi 1,30%. Lebih lanjut, rata-rata suku bunga tertimbang kredit yang dikenakan oleh perbankan Papua Barat kepada debiturnya sedikit menurun menjadi sebesar 10,02% yang sebelumnya 10,07%.

Spread **suku bunga DPK dengan suku bunga kredit terlihat semakin berkurang di setiap periodenya, namun pada dua triwulan terakhir perbedaannya relatif kecil.** Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi biaya intermediasi belum menunjukkan perbedaan yang signifikan. Bersamaan dengan pemulihan ekonomi, iklim perbankan ke depan kedepannya akan turut meningkat.

RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO KREDIT

Risiko likuiditas di Papua Barat yang salah satunya tercermin dari nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang tercatat menurun dibandingkan triwulan I 2022 tetapi masih mendekati kemampuan maksimalnya pada triwulan II 2022. LDR pada triwulan II 2022 tercatat 95,22% menurun dari triwulan lalu yang sebesar 99,59%. Tingkat LDR Papua Barat saat ini dapat dibilang sudah melampaui batas optimal yaitu pada kisaran 80%-90%. Tingkat LDR Papua Barat ini menunjukkan bahwa peran bank sebagai lembaga intermediasi sudah baik. Risiko likuiditas tetap dapat dijaga selama perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga LDR dalam rentang yang aman.

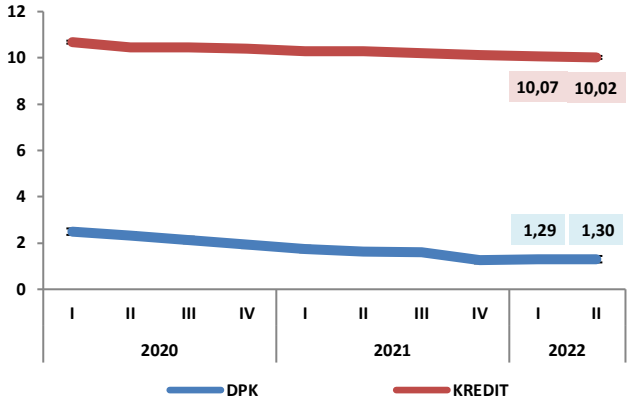

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.15. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

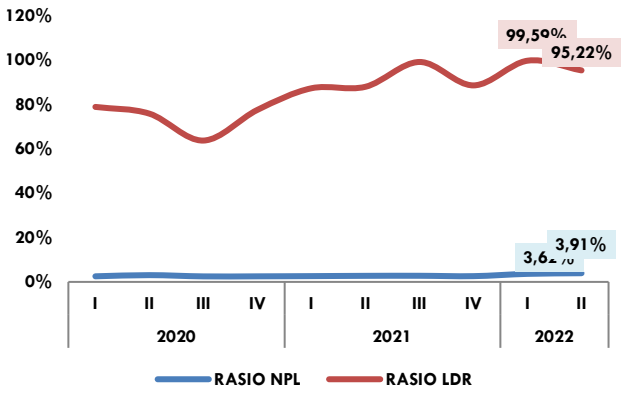

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.16. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum

Pada triwulan II 2022, rasio *Non Performing Loans* (NPL *gross*) perbankan di Papua Barat mengalami sedikit peningkatan. NPL tercatat sebesar 3,91%, sedikit naik dibandingkan dengan triwulan I 2022 yang berada di angka 3,62%. Dari sisi jenis penggunaan, risiko NPL *(gross)* yang tertinggi berada pada jenis penggunaan modal kerja dengan rasio 5,78 %. Sementara kredit investasi dan konsumsi juga masih dalam level aman dengan rasio masing-masing 4,48% dan 2,85%. Dari sisi lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar di Papua Barat, rasio NPL tertinggi tercatat pada sektor Konstruksi yang memiliki rasio NPL *(gross)* 23,67%. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus mengingat angka ini relatif sama jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 24,38%.

PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

Penyaluran kredit UMKM (berdasarkan lokasi proyek) pada triwulan II 2022 tumbuh 17,79% (yoy) meningkat dibanding triwulan I 2022 yang tercatat 15,51% (yoy). Dana yang disalurkan ke sektor UMKM pada periode ini berjumlah Rp4,67 triliun. Berdasarkan skala usahanya, penyaluran kredit UMKM sebagian besar disalurkan kepada usaha dengan skala usaha kecil yakni sebesar 51,97% dari total kredit UMKM yang disalurkan.

Kredit usaha menengah memiliki pangsa sebesar 19,10% dan kredit usaha mikro dengan pangsa 28,93%. Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 74,17% atau meningkat dari pangsa triwulan sebelumnya yang tercatat 72,90%. Sedangkan untuk kredit investasi tercatat disalurkan sebesar 25,83%.

Kualitas kredit UMKM tercatat sedikit meningkat pada periode laporan. Rasio NPL kredit UMKM sedikit meningkat dari sebelumnya 4,24% pada triwulan I 2022 menjadi 4,47% pada periode laporan. Rasio NPL pada kredit UMKM relatif masih terjaga pada level yang aman.

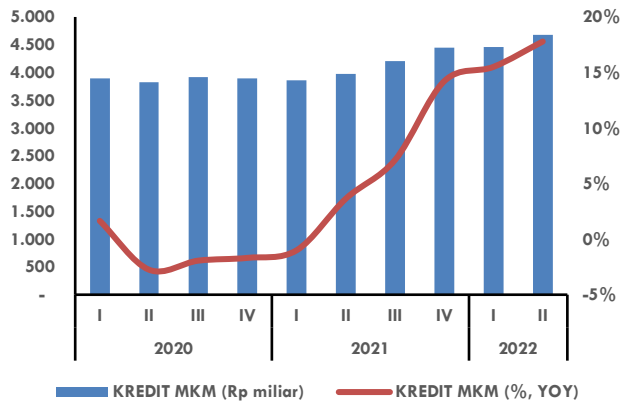

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.17. Perkembangan Kredit MKM

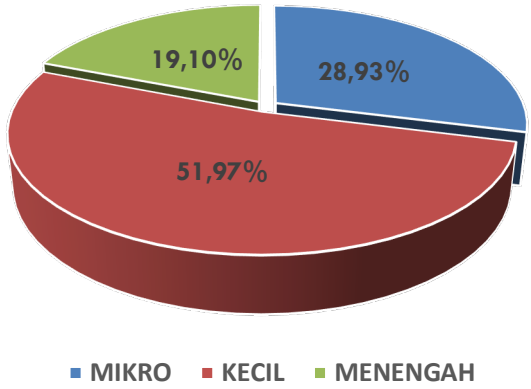

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.18. Komposisi Kredit Berdasarkan Skala UMKM

Berdasarkan sektor ekonominya, pangsa kredit UMKM terbesar disalurkan kepada sektor perdagangan dengan pangsa 56,97%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha UMKM sektor perdagangan sangat mendominasi UMKM di Papua Barat. Di sisi lain, sektor pertanian yang merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar hanya memiliki pangsa kredit UMKM sebesar 7,98%.

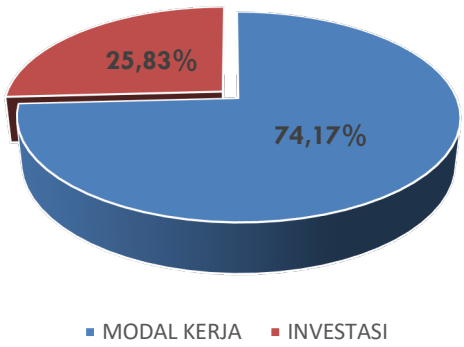

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.19. Komposisi Kredit UMKM

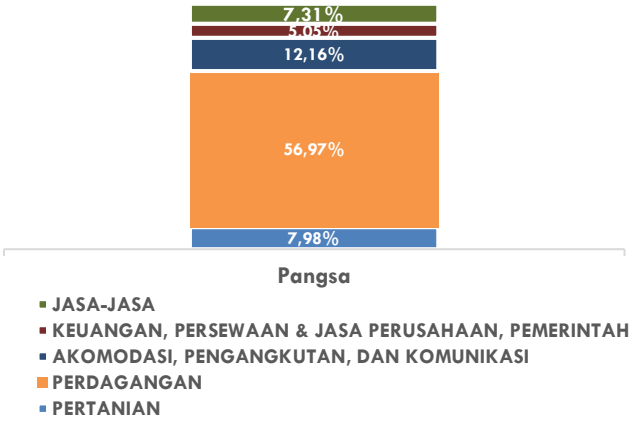

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.20. Pangsa Sektor Kredit MKM

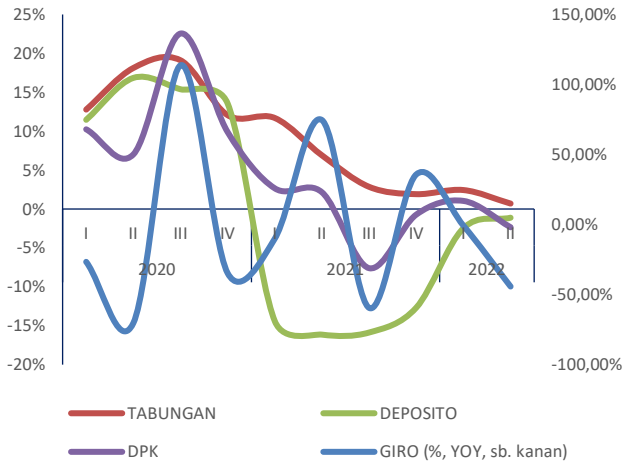

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 4.21. Komponen DPK Perseorangan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB V: PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2022, terjadi net *outflow* uang kartal sebesar Rp307,03 miliar atau meningkat 52,74% (yoy), sejalan dengan ekspansi pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua barat yang tercatat sebesar 6,82% (yoy) serta normalisasi belanja masyarakat pasca Tahun Baru 2022 dan Lebaran Idul Fitri 2022, serta awal tahun anggaran yang masih dalam tahap perencanaan. Transaksi non tunai melalui BI-RTGS, SKNBI dan Kartu Kredit mengalami penurunan, sebaliknya transaksi menggunakan Kartu Debit mengalami peningkatan jumlah transaksi.

NET OUTFLOW

Rp307,30 M

Triwulan II 2022

Rp859,4 M Triwulan I 2022 (INFLOW)

NILAI TRANSAKSI RTGS

-34,69%

(yoy) Triwulan II 2022

-20,34% (yoy) Triwulan I 2022

NILAI TRANSAKSI SKNBI

-2,75%

(yoy) Triwulan II 2022

-21,46% (yoy) Triwulan I 2022

NILAI TRANSAKSI KARTU DEBIT

70,10%

(yoy) Triwulan II 2022

3,14% (yoy) Triwulan I 2022

NILAI TRANSAKSI KARTU KREDIT

-31,33%

(yoy) Triwulan II 2022

57,67% (yoy) Triwulan I 2022

5.1. Peredaran Uang Rupiah

Aliran Uang Masuk / Keluar (*Inflow / Outflow*)

Pada triwulan II 2022, aliran uang kartal masuk/keluar melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Papua Barat mengalami *net outflow* sebesar Rp307,03 miliar. Total aliran uang kartal yang masuk mencapai Rp258,29 miliar dan aliran uang kartal yang keluar tercatat sebesar Rp565,32 miliar, sehingga total aliran uang sebesar Rp823,61 miliar. Sama halnya pada triwulan II tahun - tahun sebelumnya, triwulan II Tahun 2022 juga mengalami *net outflow* yang disebabkan Hari Raya Idul Fitri.

Pada triwulan II 2022, *net outflow* uang kartal mengalami peningkatan didorong oleh penurunan *inflow* uang kartal. Dari sisi denominasi uang *inflow* dan *outflow*, preferensi penggunaan Uang Pecahan Besar (UPB) Rp100.000,00 dan Rp50.000,00 terhitung digunakan secara luas di Papua Barat. Tercatat bahwa 69,87% dari seluruh uang *inflow* dan 73,44% dari seluruh uang *outflow* merupakan UPB Rp100.000. UPB Rp50.000,00 mencakup 26,06% dari seluruh uang *inflow* dan 23,04% dari seluruh uang *outflow*.

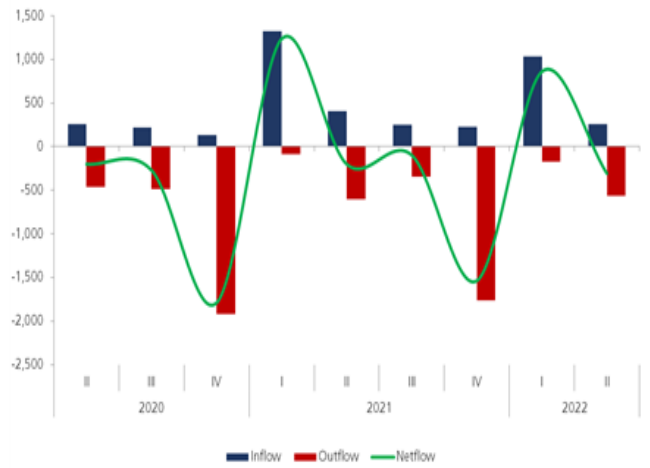

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.1. Inflow Outflow Uang Papua Barat

Penyediaan Uang Layak Edar (ULE)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *clean money policy*, KPw BI Provinsi Papua Barat secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang lusuh/Uang Tidak Layak Edar (UTLE) melalui setoran perbankan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas uang layak edar di masyarakat. Dalam upayanya, Bank Indonesia di Provinsi Papua Barat telah melakukan beberapa kali kegiatan Kas Keliling dalam kota khususnya pada masa menjelang HBKN Idul Fitri 1443 H.

Untuk memenuhi kebutuhan uang kartal bagi perbankan di daerah yang relatif jauh dari lokasi KPw BI Provinsi Papua Barat, layanan kas titipan Bank Indonesia beroperasi di 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan. Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga melaksanakan kegiatan edukasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah serta sosialisasi mengenai cara menggunakan uang dengan baik.

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.2. RTGS Papua Barat

5.2. Sistem Pembayaran

Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Pada triwulan II 2022, terjadi penurunan nilai transaksi menggunakan RTGS di Papua Barat. Nominal transaksi BI-RTGS tercatat sebesar Rp903,46 miliar atau menurun -34,69% (yoy) dari triwulan II 2021 yang tercatat sebesar Rp1,38 triliun. Penurunan transaksi RTGS secara tahunan di Provinsi Papua Barat sejalan dengan penurunan *inflow* uang kartal di Provinsi Papua Barat. Penurunan transaksi BI-RTGS menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan pengembangan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia seperti BIFAST dan QRIS.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Nilai transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2022 mengalami penurunan. Nilai transaksi non tunai menggunakan APMK pada triwulan II 2022 tercatat sebesar Rp6,20 triliun, mengalami penurunan sebesar -2,98% (yoy) dan -3,82% (qtq).

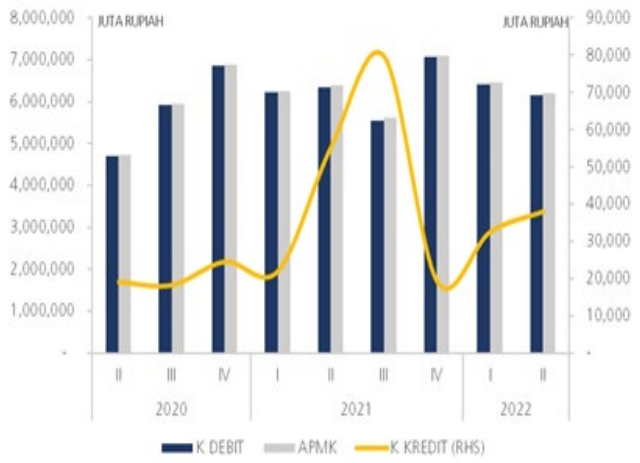

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.3. Penggunaan APMK

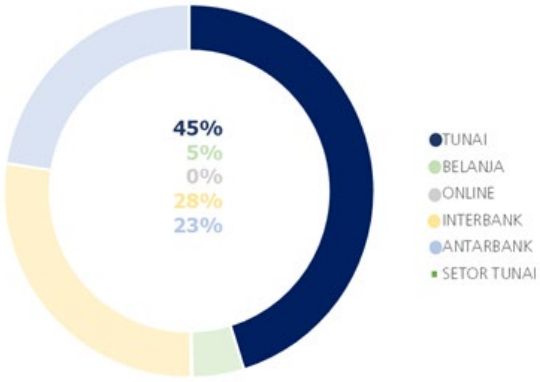

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.4. Penggunaan Kartu ATM dan Debit

Nominal transaksi APMK didominasi oleh kartu ATM dan Debit sebesar 99,39%. Penurunan transaksi APMK di Papua Barat dipengaruhi oleh relaksasi restriksi mobilitas masyarakat dimasa HBKN Idul Fitri 1443 H sehingga masyarakat pendatang cenderung kembali ke daerah masing – masing. Hal ini turut ditunjukan dari melambatnya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat dari 5,92% (yoy) pada triwulan I 2022 menjadi 4,22% (yoy) pada triwulan II 2022. Meskipun transaksi mengalami penurunan secara nominal, jumlah instrumen pembayaran non tunai (ATM, Kartu Kredit dan Kartu Debit) pada triwulan II 2022 sebanyak 832.954 kartu meningkat 6,06% dibandingkan triwulan I 2022 yang sebanyak 787.327 kartu. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan II 2022 didominasi oleh kartu debit sebesar 795.822 kartu (95,54%), kartu kredit sebesar 35.731 kartu (4,29%), dan kartu ATM sebesar 1.401 kartu (0,17%).

Penggunaan kartu ATM dan Debit di Papua Barat didominasi oleh penarikan tunai sebesar Rp2,78 triliun (45,22%) diikuti dengan transaksi interbank sebesar Rp1,69 triliun (27,55%) dan antarbank sebesar Rp1,39 triliun (22,61%). Sementara itu, kartu kredit digunakan paling banyak untuk transaksi belanja sebesar Rp31,46 miliar (82,81%) dan penarikan tunai sebesar Rp4,16 miliar (10,97%).

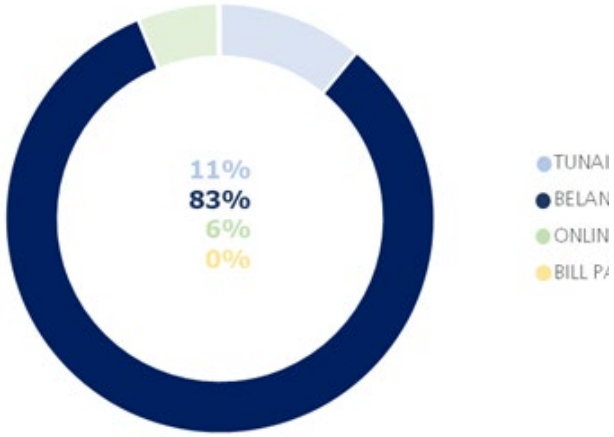

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.5. Penggunaan Kartu Kredit

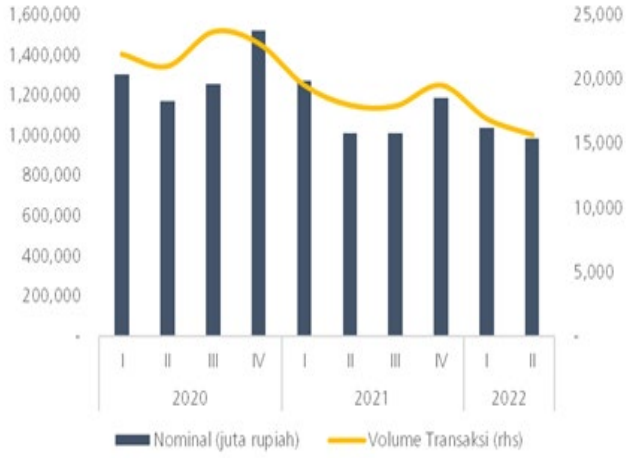

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.6. Transaksi SKNBI Papua Barat

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Nilai transaksi melalui SKNBI pada triwulan II 2022 di Papua Barat tercatat sebesar Rp985,83 miliar; mengalami penurunan sebesar -2,75% (yoy) dan -5,25% (qtq). Transaksi kliring terbagi atas Kliring Kredit yang mencatat sebanyak 66,24% dari total nominal transaksi kliring dan kliring warkat debet sebesar 33,42%. Penurunan transaksi SKNBI menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan pengembangan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia seperti BIFAST dan QRIS.

Ketersediaan Layanan Infrastruktur Sistem Pembayaran Non Tunai

Perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dan ATM terus mengalami peningkatan. Rasio ketersediaan layanan keuangan melalui mesin ATM menunjukkan peningkatan dari 4,2 mesin ATM per 1.000 km^2 pada triwulan I 2022 menjadi 4,54 mesin ATM per 1000 km^2 pada triwulan laporan.

Sejalan dengan peningkatan rasio ketersediaan mesin ATM, jumlah mesin ATM mengalami peningkatan dari 435 pada triwulan I 2022 menjadi 460 mesin ATM pada triwulan II 2022. Disisi lain, perkembangan jumlah agen LKD mengalami peningkatan dari 4.008 agen pada triwulan I 2022 menjadi 4.044 agen pada triwulan II 2022.

Sejalan dengan perkembangan jumlah agen LKD, rasio ketersediaan layanan keuangan menunjukan peningkatan dari 38,9 Agen LKD per 1.000 km^2 pada triwulan I 2022 menjadi 39,3s Agen LKD per 1.000 km^2 pada triwulan II 2022. Hal ini menunjukkan bahwa layanan infrastruktur sistem pembayaran masih perlu dikembangkan lagi.

Proses Elektronifikasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)

Sesuai dengan arahan Presiden RI mengenai BSNT, terdapat penambahan dana BSNT termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (transformasi dari program BPNT per Januari 2020) selama pandemi COVID-19. Program PKH pada triwulan II 2022 disalurkan kepada 20.188 KPM dengan nominal bantuan sebesar Rp17,33 miliar di 13 kabupaten/kota, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 dengan nominal bantuan sebesar Rp19,06 miliar.

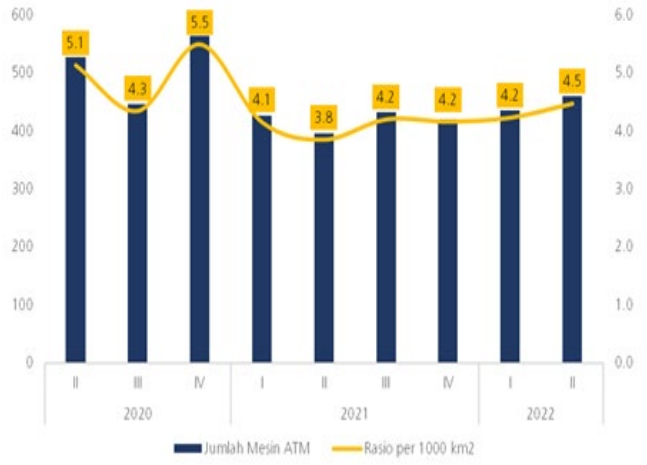

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.7. Jumlah Mesin ATM dan Rasio Per 1000km^2

Pada wilayah Provinsi Papua Barat, Program Sembako telah mengalami beberapa kali perubahan metode penyaluran bantuan sosial, sesuai dengan hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dilaksanakan pada 17 Februari 2022 dan arahan Presiden Republik Indonesia pada 1 April 2022 diketahui bahwa seluruh penyaluran Program Sembako disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) secara tunai terutama untuk penyaluran bulan Januari hingga Maret Tahun 2022 yang kemudian dilanjutkan hingga bulan Juni Tahun 2022. Program Sembako per triwulan II 2022 disalurkan kepada 71.180 KPM dengan nominal penyaluran bantuan sebesar Rp40,920 Miliar di 13 kabupaten/kota, lebih tinggi dibandingkan pada triwulan I 2022 dengan nominal penyaluran bantuan sebesar Rp37,275 miliar.

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.8. Jumlah Agen LKD dan Rasio Per 1000km^2

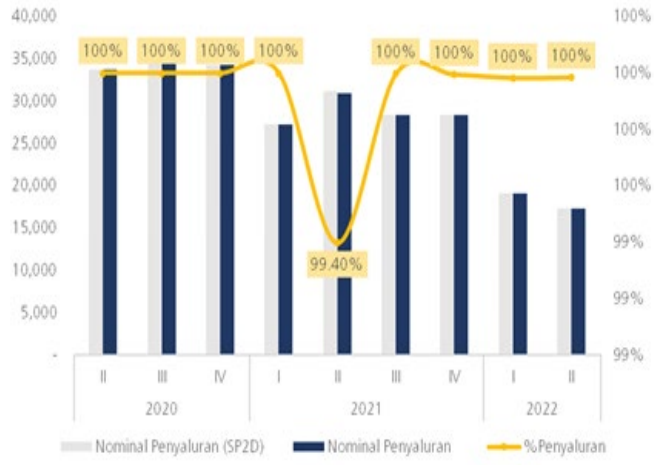

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.9. Perkembangan BSNT PKH 2020-2022

Peningkatan nominal penyaluran bantuan sejalan dengan peningkatan jumlah KPM Program Sembako pada triwulan II 2022. Selama triwulan II 2022 penyerapan bantuan kepada KPM tetap terjaga pada level 100% sama seperti triwulan I 2022. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan sosial Program Sembako dilakukan secara tunai melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dan disalurkan pada akhir triwulan.

Progres Implementasi QRIS

Jumlah *merchant* QRIS di Papua Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga triwulan II 2022, jumlah *merchant* yang telah menggunakan QRIS di Papua Barat mencapai 47.652 *merchant* atau meningkat sebesar 351,42% (yoy) dibandingkan triwulan II 2021 yang sebanyak 10.556 *merchant,* dan tumbuh sebesar 49,09% (qtq) dibandingkan triwulan I 2022. Peningkatan jumlah *merchant* QRIS sejalan dengan upaya Bank Indonesia Provinsi Papua Barat untuk mengembangkan layanan sistem pembayaran non-tunai. Berdasarkan lokasi merchant QRIS, pada triwulan II 2022 lokasi *merchant* didominasi di Kabupaten Manokwari dengan jumlah *merchant* sebanyak 23.917 (50,19%) diikuti dengan Kota Sorong dengan jumlah *merchant* sebanyak 18.133 (38,05%).

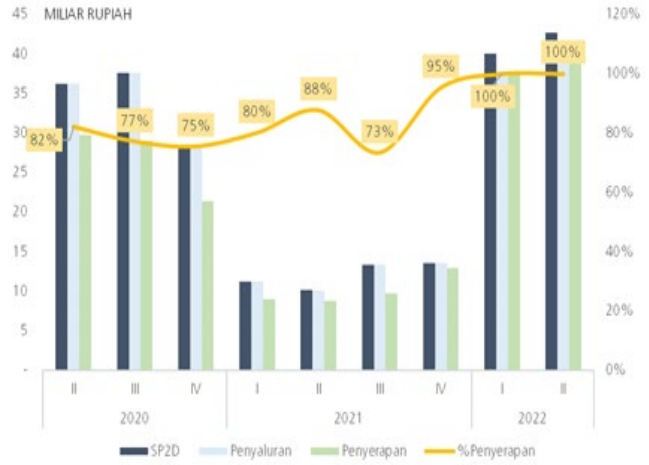

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.10. Program Sembako 2020-2022

Berdasarkan kategori usaha *merchant*, penggunaan QRIS di Papua Barat didominasi oleh kategori Usaha Kecil (UKE) sebesar 29.052 *merchant* (60,97%) diikuti oleh kategori Usaha Mikro (UMI) sebesar 10.212 *merchant* (21,43%) dan Usaha Menengah (UME) sebesar 7.826 *merchant* (16,42%).

Transaksi Jual-Beli Valuta Asing

Transaksi jual-beli valuta asing di Papua Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai akibat pelonggaran kebijakan penanganan COVID-19. Berdasarkan hasil pengawasan *off-site*, aktivitas Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengalami peningkatan pada triwulan II 2022.

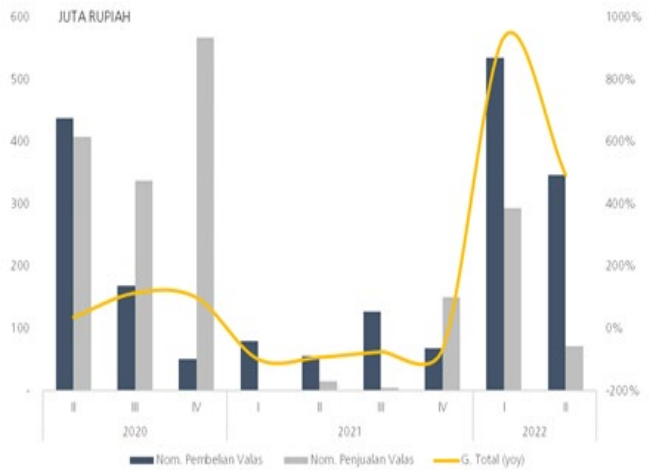

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.11. Transaksi Jual Beli KUPVA BB

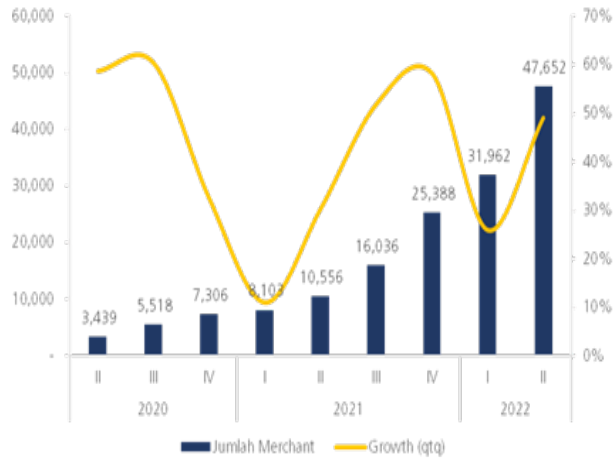

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.12. Perkembangan Merchant QRIS

Total transaksi KUPVA BB pada triwulan II 2022 tercatat sebesar Rp418,30 juta dengan proporsi pembelian valas sebesar Rp346,11 juta dan penjualan valas sebesar Rp72,219 juta. Transaksi pembelian dan penjualan valas mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 526,12% (yoy), sedangkan transaksi penjualan valas sebesar 374,47% (yoy). Berdasarkan jenis mata uang, transaksi perdagangan valuta asing di Papua Barat masih didominasi oleh mata uang Dollar AS. Transaksi penjualan Dollar AS pada triwulan II 2022 mendominasi dengan *share* sebesar 84,34% dan pada transaksi pembelian valas Dollar AS mendominasi dengan *share* sebesar 51,99%.

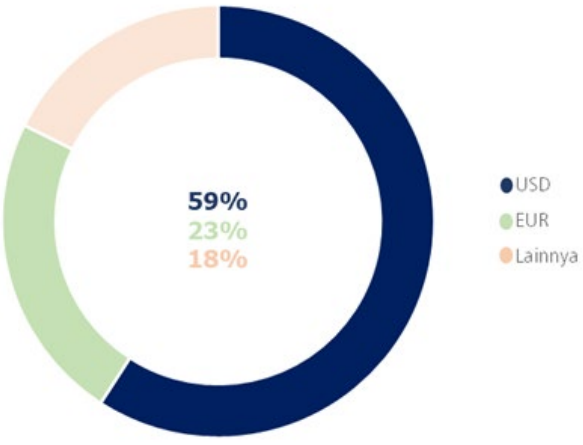

Sumber: Bank Indonesia
Grafik 5.13. Transaksi Jual Beli KUPVA BB berdasarkan Kurs

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB VI. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat mulai membaik di masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dilihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Ketenagakerjaan di Papua Barat mengalami penurunan pada Februari 2022 seiring dengan pemulihan roda perekonomian nasional. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2021 serta indeks *gini ratio* Papua Barat turut mengalami penurunan. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan pada Februari 2022 dibandingkan posisi Agustus 2021.

6.1 KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketengakerjaan di Papua Barat mengalami perbaikan ditengah pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19 berlangsung yang dilihat melalui peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Papua Barat pada periode Februari 2022. Jumlah penduduk usia kerja di Papua Barat tercatat sebanyak 872.554 orang atau meningkat 19,49% dibanding posisi Agustus 2021. Tenaga kerja di Papua Barat masih didominasi oleh penduduk angkatan kerja yang tercatat sebanyak 607.200 orang dengan tingkat partisipasi sebesar 69,59% dari seluruh penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan posisi Agustus 2021 sejumlah 513.666 orang atau mengalami peningkatan sebesar 18,21% dibanding posisi Agustus 2021.

Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami penurunan dari 70,34% pada Agustus 2021 menjadi 69,59% pada Februari 2022. Namun, TPAK Provinsi Papua Barat pada Februari 2022 tercatat masih lebih tinggi dari TPAK Nasional yang tercatat sebesar 69,06%. Penurunan TPAK tersebut disumbang oleh peningkatan jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang mencapai 265.354 orang atau meningkat 22,52% dibanding posisi Agustus 2021.

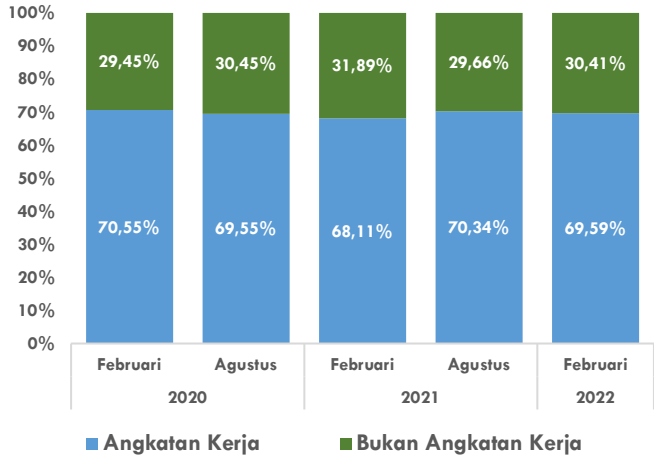

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.1. Pangsa Penduduk Usia Kerja

Peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja yang mencapai 607.200 orang pada Februari 2022 atau meningkat sebesar 18,21% dibandingkan Agustus 2021 menahan TPAK tetap terjaga pada level tersebut.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Papua Barat. Pada Februari 2022, sektor pertanian mempunyai pangsa terbesar atau 30,83% dari total penduduk yang bekerja di Papua Barat. Pangsa tersebut menurun dibanding posisi Agustus 2021 yang mencapai 32,69%. Penurunan pangsa tersebut seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha konstruksi (pangsa 7,76%) dan industri pengolahan (pangsa 7,57%), dimana masing-masing secara jumlah meningkat sebesar 58,83% dan 86,58% dibandingkan Agustus 2021. Secara sektoral, pada Februari 2022 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan tenaga kerja sebesar 11,55% dibandingkan dengan Agustus 2021 atau sebesar 47,03% apabila dibandingkan dengan Februari 2021.

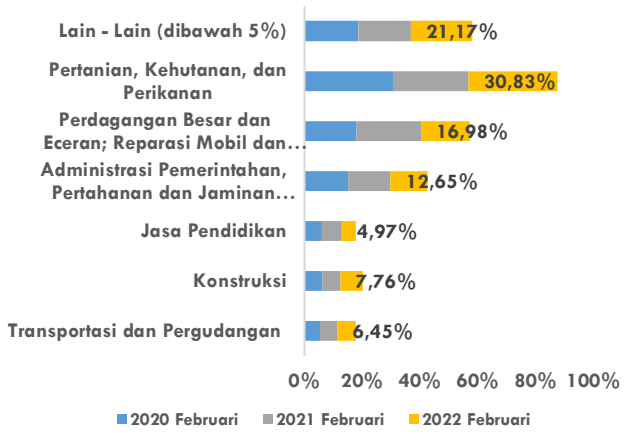

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.2. Pangsa Angkatan Kerja Per Sektor

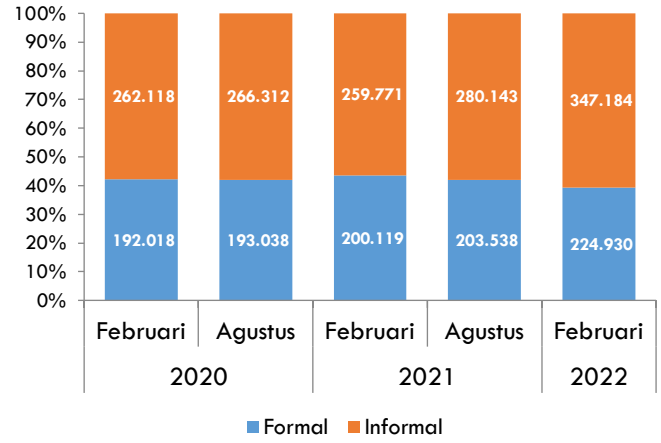

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.3. Pangsa Penduduk Bekerja

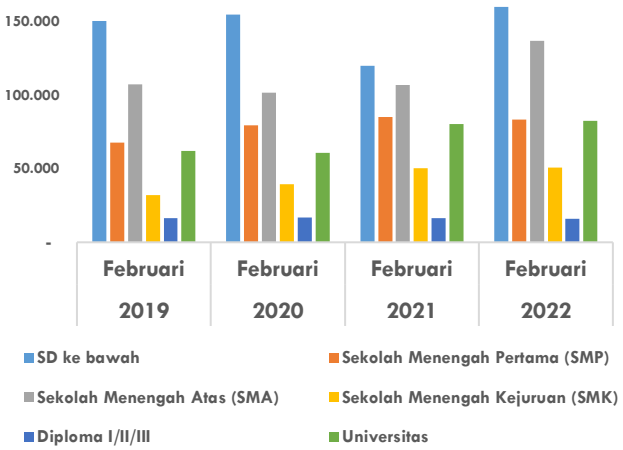

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.4. Pendidikan Penduduk Bekerja

Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja di Papua Barat pada Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 18,28% dibandingkan Agustus 2021 atau sebesar 24,40% apabila dibandingkan dengan Februari 2021.

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar angkatan kerja di Papua Barat masih terserap di sektor informal. Jumlah pekerja di sektor informal tercatat pada Februari 2022 sebanyak 347.184 orang atau 60,68% dari keseluruhan angkatan kerja yang bekerja. Jumlah pekerja sektor informal mengalami peningkatan dibandingkan periode Agustus 2021 yang mencatat 280.143 orang atau 57,92%. Sektor informal terdiri dari angkatan kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Di sisi lain, proporsi pekerja sektor formal Papua Barat yaitu buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri dibantu buruh tercatat sebanyak 224.930 orang atau 39,32% dari keseluruhan angkatan kerja yang bekerja. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding periode Agustus 2021 yang tercatat sebanyak 203.538 orang. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja formal di Papua Barat.

Dari segi pendidikan, kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kualitas SDM mengalami penurunan tercermin dari penurunan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) sebesar -1,18% pada Februari 2022 dibanding pada Agustus 2021. Namun, tenaga kerja berpendidikan SMA/SMK kebawah mengalami peningkatan sebesar 23,35% dibanding periode Agustus 2021.

Tingkat pengangguran Provinsi Papua Barat pada Februari 2022 meningkat dibandingkan periode Agustus 2021. Peningkatan tersebut seiring dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Papua Barat yang pada triwulan I 2022 tercatat sebesar -1,01% (yoy).

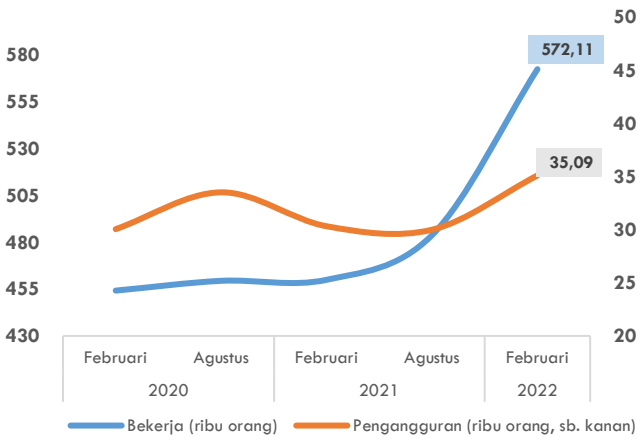

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.5. Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran

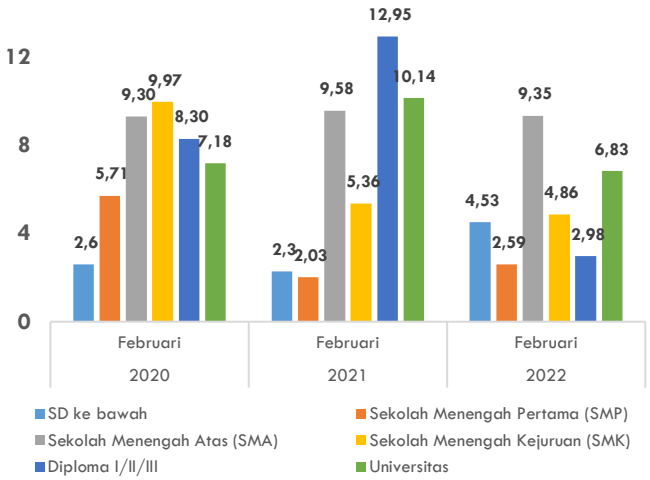

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.6. TPT berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jumlah pengangguran pada Februari 2022 tercatat sebanyak 35.086 orang atau meningkat sebesar 15,75% (yoy). Jumlah ini mengalami peningkatan 17,01% apabila dibandingkan dengan Agustus 2021 yang tercatat sebanyak 29.985 orang.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja turut mendorong penurunan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT pada Februari 2022 tercatat sebesar 5,78% atau menurun dibanding Agustus 2021 yang tercatat sebesar 5,84%. TPT Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,83%. TPT di Papua Barat masih didominasi oleh daerah perkotaan dibanding pedesaan. TPT perkotaan mengalami penurunan dari 9,08% pada Agustus 2021 menjadi 7,55% pada Februari 2022.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari penduduk pengggangguran, pangsa terendah pengangguran berasal dari latar pendidikan SMP dan SD dengan porsi sebesar 49,93% dari jumlah pengangguran. TPT terendah per Februari 2022 tercatat pada pengangguran dengan tingkat pendidikan Diploma/Universitas yang menurun 1,18% dibanding Agustus 2021.

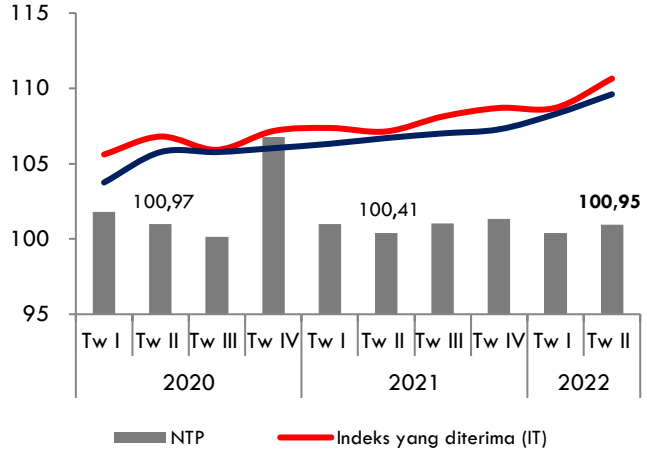

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.7. Perkembangan NTP

6.2 NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2022 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Indeks NTP Papua Barat tercatat menurun dari 100,38 poin pada triwulan I 2022 menjadi 100,95 poin pada triwulan I 2022. Indeks yang Diterima (IT) dari hasil perolehan panen mengalami peningkatan dari 108,71 menjadi 110,65 atau meningkat 1,94 poin. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding biaya yang harus dikeluarkan oleh petani selama kegiatan tanamnya atau Indeks yang Dibayar (IB) yang juga meningkat dari 108,30 menjadi 109,61 atau meningkat 1,31 poin.

	IT	IB	NTP	gNTP (qtq)
Tanaman Pangan	115,39	110,12	104,79	0,26%
Hortikultura	105,58	110,22	95,78	0,64%
Tanaman Perkebunan Rakyat	123,73	109,35	113,15	2,65%
Peternakan	114,94	108,90	105,54	-0,31%
Perikanan	105,60	108,42	97,40	0,25%

Sumber: BPS, diolah
Tabel 6.1. IT, IB, NTP, dan Pertumbuhan NTP (qtq) Sektoral

Peningkatan NTP Papua Barat pada triwulan II 2022 terjadi pada pada 4 (empat) subsektor yaitu subsektor Tanaman pangan, subsektor Holtikultura, subsektor Tanama Perkebunan Rakyat dan subsektor Perikanan. NTP tertinggi dicatat oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat yang mencapai 113,15 poin. NTP terendah tercatat pada subsektor holtikultura sebesar 95,78 poin (<100) yang menandakan biaya yang harus dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan indeks yang diterima selama kegiatan tanamnya. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah perikanan yang merupakan subsektor dengan pangsa terbesar dibandingkan dengan subsektor lainnya dalam komponen PDRB Papua Barat yang mencatatkan NTP dibawah 100 secara berturut-turut sejak triwulan IV 2018 meskipun terjadi peningkatan NTP Perikanan sebesar 0,25% **(qtq)** pada triwulan II 2022. Indeks NTP subsektor yang masih berada dibawah 100 turut menjadi penyumbang peningkatan tingkat kemiskinan di Papua Barat.

6.3 KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di Papua Barat pada Maret 2022 tercatat sebesar 21,33%, menurun bila dibandingkan dengan posisi September 2021 yang tercatat 21,82%. Tingkat kemiskinan Papua Barat berada di atas tingkat kemiskinan Nasional dan menjadi provinsi termiskin kedua secara Nasional. Tingkat kemiskinan Nasional pada Maret 2022 tercatat sebesar 9,54% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,16 juta jiwa. Papua Barat menyumbang 0,84% dari total jumlah penduduk miskin Nasional pada Maret 2022.

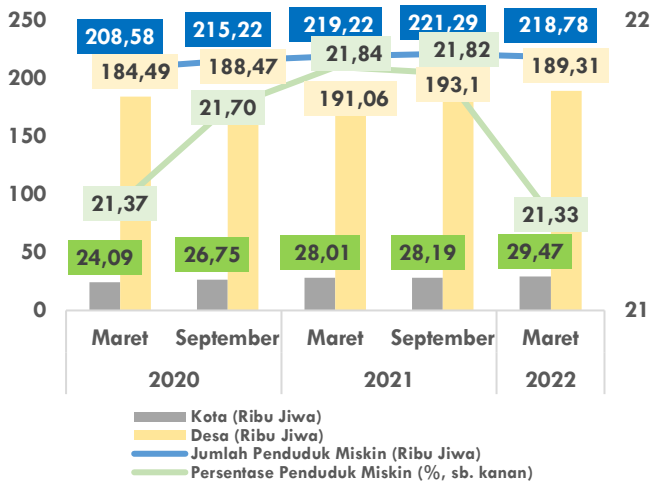

Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Pemulihan ekonomi Papua Barat dari Pandemi COVID-19 berangsur membaik dilihat dari penurunan jumlah kemiskinan yang menurun sebesar -1,13% per Maret 2022 dibandingkan posisi September 2021 serta berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin menurun terhadap jumlah penduduk Papua Barat dari 21,82% pada September 2021 menjadi 21,33% pada Maret 2022. Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan dampak pulihnya kembali aktifitas masyarakat serta roda perekonomian yang didukung dengan regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 yang terkendali. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebanyak 218.780 orang, lebih rendah dibandingkan periode September 2021 yang tercatat sebanyak 221.290 orang.

Penduduk miskin di Papua Barat masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di desa. Hambatan akses masyarakat pedesaan untuk memperoleh sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan yang layak dibandingkan masyarakat di perkotaan turut menandakan pentingnya akselerasi penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas antar wilayah serta perlunya pemerataan pembangunan sehingga dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat, khususnya di pedesaan.

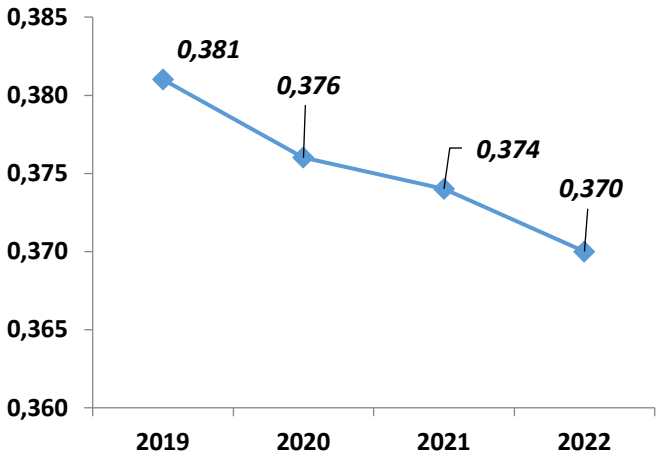

Sumber: BPS, diolah
Grafik 6.9. Perkembangan Indeks *Gini Ratio*

Secara data Maret 2022, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di pendesaan sebesar -1,96% dibandingkan September 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan 4,54% pada Maret 2022 dibandingkan September 2021. Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di pendesaan sebanyak 189.310 orang dan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 29.470 orang.

Angka garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan pada Maret 2022 dengan mencatat Rp665.604,00 per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan periode September 2021 sebesar Rp652.521,00. Angka garis kemiskinan Papua Barat tersebut berada di atas angka garis kemiskinan Nasional yang tercatat sebesar Rp505.1469,00 per kapita per bulan.

Tingkat ketimpangan di Provinsi Papua Barat meningkat dan masih berada pada kategori "ketimpangan sedang" dengan *Gini Ratio* sebesar 0,370 pada Maret 2022. Angka ini menurun dibanding September 2021 yang sebesar 0,374 maupun Maret 2021 sebesar 0,380. Perkembangan *gini ratio* Papua Barat di perkotaan mengalami peningkatan dari 0,399 pada September 2021 menjadi 0,411 pada Maret 2022. Sementara itu, *gini ratio* Papua Barat di pedesaan mengalami penurunan dari 0,313 pada September 2021 menjadi 0,294 pada Maret 2022.

Indikator *gini ratio* menggambarkan pemerataan maupun ketimpangan pendapatan yang dihasilkan. *Gini ratio* bernilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan *gini ratio* bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BANK INDONESIA

BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN

Perekonomian global pada tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang mampu menumbuhkan optimisme global dan memberikan dampak positif, baik pada perekonomian nasional maupun Papua Barat.

Perekonomian Papua Barat pada 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2021. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada triwulan I 2022 seiring dengan normalisasi pasca HBKN Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diperkirakan akan kembali membaik pada triwulan selanjutnya seiring dengan relaksasi restriksi mobilitas masyarakat, efektivitas program vaksinasi, dan berbagai kebijakan *counter cyclical* yang diambil oleh Pemerintah dan kebijakan moneter akomodatif diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi secara gradual selama tahun 2022.

Inflasi keseluruhan pada tahun 2022 diperkirakan akan berada pada rentang atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,0%±1% (yoy) seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan kenaikan harga komoditas global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

5,4% (yoy) 2022
World Economic Outlook, IMF

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

4,5% – 5,3% (yoy) 2022
Bank Indonesia

PERTUMBUHAN EKONOMI PAPUA BARAT

3,00 – 3,50% (yoy) 2022
-0,51% (ctc) 2021

INFLASI PAPUA BARAT

3,0% ± 1% (yoy) 2022
3,47% (yoy) 2021

7.1. PEREKONOMIAN INDONESIA

Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut ditopang oleh meningkatnya konsumsi dan investasi nonbangunan serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 tetap kuat, yakni 5,01%-5,03% (yoy), melanjutkan momentum pemulihan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Keberlangsungan proses pemulihan ekonomi domestik pada triwulan III 2022 diindikasikan dengan berbagai macam faktor, di antaranya yaitu keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur. Kemudian bila dilihat dari segi eksternal**,** kinerja ekspor lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya, khususnya pada komoditas batu bara, bijih logam, dan besi baja didukung oleh permintaan ekspor yang tetap kuat dan harga komoditas global yang masih tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh perbaikan beberapa lapangan usaha, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Transportasi dan Pergudangan. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Walaupun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor, sementara kenaikan inflasi dapat menahan konsumsi swasta. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga baik, sehingga diprakirakan bisa mendukung sektor eksternal di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan pada triwulan II 2022 diprakirakan mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas yang sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap terjaga karena didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi portofolio pada Agustus 2022 hingga 19 Agustus 2022 mencatat *net inflow* sebesar 16 miliar dolar AS, setelah sebelumnya mencatat *net outflow* sebesar 21 miliar dolar AS pada Juli 2022 cadangan devisa tetap di atas standar kecukupan internasional. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2022 tercatat sebesar 136,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah, jumlah tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Ke depan, kinerja NPI pada 2022 diprakirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi. Kinerja NPI tersebut juga didukung neraca transaksi modal dan finansial terutama dalam bentuk PMA sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga.

Rupiah sampai dengan 26 Agustus 2022 terdepresiasi 3,81% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021 relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Malaysia 6,78%, India 6,88%, dan Thailand 7,22%. Depresiasi tersebut merupakan akibat dari pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan pasokan valas dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan. Secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,86% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* tercatat sangat tinggi mencapai 11,47% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan. Inflasi kelompok *administered prices* juga meningkat menjadi 6,51% (yoy) sejalan dengan kenaikan angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi. Kedepan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3,0±1% dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia untuk langkah-langkah pengendaliannya.

Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Pada Juli 2022 rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 27,92% sehingga tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit pada Juli 2022 tercatat sebesar 10,71% (yoy). Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 15,20% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 18,08% (yoy) terutama didukung oleh segmen mikro dan kecil. Pada Juli 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing masing sebesar 14,89% (yoy) dan 9,58% (yoy). Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia hingga 26 Agustus 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID 19 sebesar Rp99,33 triliun. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan terus meningkat. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal *Capital Adequacy Ratio* /CAR Juni 2022 tetap tinggi sebesar 24,66% dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* / NPL) tetap terjaga, yakni sebesar 2,86% (bruto) dan 0,80% (neto). Pada Juli 2022, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,59% (yoy).

Dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang dilakukan di atas, pertumbuhan kredit pada 2022 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya, menjadi dalam kisaran 9,0-11,0% (yoy) dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga.

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,4% (yoy). Hal ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,5% – 5,3% oleh Bank Indonesia. Proyeksi tersebut menunjukkan tingginya optimisme perbaikan ekonomi, baik dari lembaga internasional maupun Bank Indonesia pada 2022.

7.2. PEREKONOMIAN PAPUA BARAT

Prospek Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat Barat tahun 2022 diproyeksikan terus melanjutkan perbaikan sejalan dengan masih cukup baiknya permintaan global dan potensi perbaikan permintaan domestik seiring dengan relaksasi mobilitas pada triwulan II 2022. Dengan melihat berbagai *leading indicator* terkini, serta dukungan kebijakan akomodatif dari Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan daerah, OJK serta otoritas lainnya, perekonomian Papua Barat keseluruhan tahun 2022 berpotensi tumbuh pada kisaran 2,5%-3,5% (yoy) dengan pergerakan arah cenderung pada rentang atas proyeksi, meskipun tidak menutup kemungkinan akan bias akibat adanya *unplanned maintenance* pada LNG Tangguh.

Tercapainya akselerasi pemulihan ekonomi tentunya membutuhkan pemenuhan beberapa prasyarat. Kebijakan terkait pandemi COVID-19 dipandang tetap harus seimbang dan tidak mengurangi mobilitas secara drastis, namun tetap menumbuhkan kesadaran penanganan pandemi yang baik. Agar optimisme pemulihan ekonomi tahun 2022 secara menyeluruh tetap dapat terjaga, maka perlu memenuhi prasyarat utama yang perlu diupayakan bersama, yakni:

1. Konsistensi melaksanakan kebijakan *dynamic balancing strategy* termasuk menjaga protokol kesehatan yang perlu terus digaungkan kepada masyarakat dan pelaku usaha/industri termasuk implementasi kebijakan CHSE,
2. Percepatan vaksinasi Papua Barat sehingga target penyelesaian vaksinasi dapat didorong untuk tercapai pada 2022, serta
3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi *pentahelix* sebagai upaya seluruh pihak untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.
4. Perekonomian Papua Barat dari sisi pengeluaran diperkirakan meningkat terutama pada sisi konsumsi rumah tangga. Seiring dengan proses vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat di Papua Barat, aktivitas masyarakat diharapkan mengalami peningkatan.

Permintaan domestik secara keseluruhan tahun 2022 diprakirakan akan terus menunjukkan perbaikan menuju level normalnya. Beberapa asumsi yang mendasari adalah tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pada tahun 2022 yang lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan tahun 2021. Faktor selanjutnya adalah berlanjutnya pembukaan aktivitas ekonomi dan pariwisata secara lebih luas seiring dengan pembebasan syarat untuk penerbangan udara yang tidak mewajibkan menggunakan PCR atau *Rapid Antigen* apabila

sudah menerima vaksinasi dosis ketiga. Faktor ketiga adalah masih berlanjutnya beberapa kebijakan stimulus dari pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon PPNBM, diskon PPN DTP properti untuk pembelian properti, dan kebijakan bansos reguler.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas, optimisme masyarakat terhadap ekonomi juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menunjukkan kondisi serupa. IKK mengalami peningkatan dari 121,78 pada triwulan I 2022 menjadi 131,56 pada Mei 2022 yang menunjukkan peningkatan optimisme masyarakat.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari sisi pengeluaran diperkirakan tertahan dari sisi ekspor luar negeri seiring dengan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) oleh Pemerintah sehingga target jumlah kargo ekspor LNG tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2021. Di sisi lain, alokasi kargo ekspor LNG menuju domestik cenderung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat melalui ekspor antar provinsi.

Dari sisi dukungan pembiayaan secara keseluruhan di Papua Barat, pertumbuhan kredit perbankan mengalami pertumbuhan sebesar 6,51% (yoy) pada April 2022. Aset perbankan dan DPK turut mengalami pertumbuhan positif secara berurutan sebesar 6,67% (yoy) dan 7,85% (yoy). Hal ini turut menunjukan bahwa terjadi pertumbuhan aktivitas ekonomi seiring dengan adanya HBKN Idul Fitri 1443H, Paskah, dan Jumat Agung pada triwulan II 2022.

Prospek Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi sektoral, berlanjutnya pemulihan ekonomi 2022 diperkirakan terjadi di sebagian besar Lapangan Usaha (LU). Perbaikan utamanya disumbang oleh pemulihan kinerja LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Pertanian, serta LU Perdagangan. Secara keseluruhan tahun 2022, LU Industri Pengolahan diperkirakan akan menjadi motor perbaikan ekonomi dari sisi sektoral. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan terkait dengan peningkatan target jumlah kargo LNG serta pertumbuhan Industri non-migas sejalan dengan membaiknya permintaan dari domestik seiring dengan relaksasi mobilitas masyarakat. Di sisi lain, perbaikan permintaan domestik juga turut memberikan peran pada perbaikan kinerja industri dengan dominasi orientasi pasar domestik, seperti industri pariwisata.

Beroperasinya kembali industri dan peningkatan aktivitas masyarakat turut mendorong perbaikan sektor perdagangan, khususnya pada sektor pariwisata, penyediaan akomodasi dan makan minum disertai dengan libur anak sekolah dapat memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi Papua Barat.

7.3. PROSPEK INFLASI PAPUA BARAT

Inflasi Papua Barat pada 2022 diperkirakan berada pada rentang atas sasaran inflasi nasional sebesar 3 ± 1% (yoy). Secara keseluruhan, inflasi Papua Barat tahun 2022 diprakirakan masih dapat terkendali. Peningkatan tekanan inflasi 2022 didorong oleh kelompok inflasi inti (*core inflation*/CI) dan kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered price*/AP). Tekanan inflasi pada kelompok CI didorong oleh peningkatan permintaan yang sejalan dengan perbaikan ekonomi. Di sisi lain, inflasi pada kelompok AP turut didorong oleh penyesuaian berbagai tarif seperti cukai rokok dan PPN, serta masih meningkatnya harga energi global yang turut mempengaruhi pergerakan harga domestik seperti komoditas bahan bakar rumah tangga. Penerbangan udara sebagai sarana transportasi utama masyarakat untuk menuju Papua

Barat turut diperkirakan mengalami inflasi yang tinggi seiring dengan aktivitas berpergian masyarakat yang mulai kembali normal.

Peningkatan inflasi sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian sehingga permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa diharapkan meningkat. Perekonomian yang meningkat diikuti oleh inflasi yang stabil dan dalam *range* yang ditentukan harus tetap diupayakan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Sesuai dengan mandatnya, Bank Indonesia akan berusahan menjaga capaian inflasi berada pada sasaran inflasi 2022, yaitu 3±1% (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait gangguan pasokan dan distribusi domestik. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat telah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi pada tahun 2022 yang tertuang dalam Strategi 4K TPID Provinsi Papua Barat. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat tetap menjaga inflasi Papua Barat tahun 2022 pada level yang terkendali.

Halaman ini sengaja dikosongkan

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Rut W. Eka Trisilowati

KOORDINATOR PENYUSUN

Eko Listiyono

TIM PENULIS

Hotasi Doli Marulitua Purba
Akhmad Adrian Wiryatomo
Yohannes Berchmans Praditya Wisnu Dewanto
Muhammad Harits Abdullah
Teuku Aldefa Angkasa Wangsa Banowo
Oddy Hasbul Warits
Ihsan Bagus Atyantodito
Lashown Toga

KONTRIBUTOR

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Fngsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan
Fungsi Implementasi Pengawasan SP-PUR

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Jl. Yogyakarta No. 1 Manokwari Papua Barat
No. Telp. (0986) 216066 No. Fax. (0986) 216063
Email : hotasi_doli@bi.go.id, akhmad_adrian@bi.go.id